

EDISI
JAN - FEB 2023
TAHUN XV

DITERBITKAN OLEH HUMAS DPRD
SUMATERA BARAT



RANPERDA POKOK-
POKOK KEBUDAYAAN
JADI USUL PRAKARSA
DPRD SUMBAR



SEKRETARIAT DPRD
SUMBAR WAKILI PROVINSI
DI AJANG KETERBUKAAN
INFORMASI NASIONAL



MIIMBAR

DPRD SUMATERA BARAT // ASPIRATIF - RESPONSIF - INOVATIF



Seminar Tiga Ranperda Membuka Ruang Publik Untuk Penyempurnaan Produk Hukum

TIDAK UNTUK
DIPERJUALBELIKAN

Pengantar Redaksi



SUSUNAN REDAKSI
MIMBAR DPRD PROV SUMBAR

Mengawali tahun 2023, Majalah MIMBAR hadir dengan membawa seminar tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai Laporan utama. Seminar dalam rangka uji publik terhadap produk hukum daerah tersebut dipandang penting oleh Redaksi agar masyarakat luas dapat pula mengetahui bagaimana anggota DPRD bekerja secara maksimal dalam melahirkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat serta relevan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, beberapa agenda penting yang dirangkum Redaksi di Majalah MIMBAR edisi perdana tahun 2023 ini adalah kesibukan anggota dewan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Penetapan beberapa Ranperda menjadi Perda, rapat-rapat kerja, dan sebagainya.

Agenda krusial lainnya yang juga tak kalah pentingnya yang dilaksanakan oleh DPRD pada awal tahun 2023 adalah penyusunan Kode Etik anggota DPRD, yang merupakan acuan atau pedoman perilaku bagi seluruh anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kode etik tersebut disusun untuk memperbaiki Kode Etik yang lama yang sudah tidak berlaku karena adanya perubahan dari peraturan yang menaunginya.

Redaksi juga merangkum beberapa kegiatan yang berkaitan dengan penyerapan aspirasi masyarakat. Baik yang disampaikan langsung ke gedung DPRD maupun yang dijemput oleh anggota dewan ke daerah pemilihannya. Juga menerima kunjungan dari daerah lain atau berkunjung ke daerah lain dalam rangka studi tiru untuk penyempurnaan program yang sedang dibahas. Termasuk juga kunjungan konsultasi ke kementerian terkait dalam rangka optimalisasi pembahasan ataupun untuk menyesuaikan produk-produk hukum yang akan dilahirkan dengan peraturan perundang-undangan.

Redaksi menyadari, masih banyak hal yang sedang dilaksanakan oleh DPRD yang patut diketahui oleh publik. Namun keterbatasan ruang menjadi kendala sehingga tidak semua bisa disajikan di Majalah MIMBAR kali ini. Meski demikian, masyarakat masih bisa mengakses website DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk bisa mendapatkan informasi lebih banyak karena website tersebut menayangkan informasi secara up to date, juga dilengkapi beberapa fitur yang memudahkan masyarakat mengetahui banyak hal tentang kedewanan dan pemerintahan.

Akhir kata, Redaksi menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam penerbitan Majalah MIMBAR ini, karena dalam konsepnya tidak ada gading yang tidak retak, demikian juga tim redaksi. Selamat Membaca.

Pemimpin Redaksi

Zardi Syahrir, SH, M.M.

Ketua:
Supardi

Wakil ketua:
H. Irsyad Syafar, Lc, M. Ed
H. Suwirpen Suib, S.Sos
H. Indra Dt Rajo Lelo, SH, MM

Penanggung Jawab:
H. Rafliis, SH, MM

Redaktur:
Zardi Syahrir, SH, MM

Penyunting/ Editor:
Dahrul Idris, S.STP, M.Si

Desain Grafis:
Valerio Nova, ST, MSE, MA
Fotografer:
Marjoni, Pendika Saputra

Sekretaris:
Rita Suzana
Deny Suryani, S.IP
Mai Indra

Konsultan
Padangmedia.com

Sekretariat Redaksi: Humas DPRD Provinsi
Sumatera Barat

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang, Sumbar
Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593

Fax: (0751) 7059328

Website: <http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

Sekapur Sirih



Padatnya jadwal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat sejak awal tahun 2023 menuntut Sekretariat DPRD sebagai OPD yang ditugaskan memfasilitasi lembaga DPRD memacu kinerja, untuk memastikan seluruh kegiatan kedewanan dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan tugas sekretariat DPRD seiring dengan kesibukan Lembaga kedewanan, yang sangat padat pada akhir tahun bahkan di awal tahun 2023 pun langsung gerak cepat menuntaskan berbagai agenda. Demikian juga seluruh instrument di sekretariat mengebut gerak kerja agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan secara maksimal.

Di tengah padatnya kesibukan tersebut, sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terus meningkatkan kinerja dan berinovasi demi terlaksananya pelayanan pemerintah yang maksimal kepada masyarakat. Mengakhiri tahun 2022, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat meraih beberapa prestasi yang dirasakan sangat membanggakan sebagai

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang bertugas memfasilitasi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Meski demikian prestasi tersebut tidak membuat peningkatan kinerja sampai di situ. Bahkan, prestasi yang telah diraih adalah sebuah tantangan bagaimana mempertahankannya, dan terus meningkat setiap tahun.

Mengawali tahun 2023, sejumlah agenda DPRD yang menuntut kerja serius sekretariat antara lain pembahasan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), termasuk Ranperda yang lahir dari penggunaan hak usul Prakarsa DPRD. Sementara beberapa Ranperda juga telah berhasil ditetapkan sebagai peraturan daerah. Selain itu, DPRD Provinsi Sumatera Barat juga tengah menyusun Kode Etik yang baru karena kode etik yang lama tidak berlaku lagi.

Kemudian, juga agenda lainnya seperti kunjungan kerja ke kabupaten dan kota dalam rangka mencari masukan terkait Ranperda Tanah Ulayat. Juga kunjungan ke kementerian terkait untuk konsultasi terkait penyempurnaan produk

hukum daerah serta optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seluruh agenda tersebut sejauh ini dapat berjalan secara baik dan lancar.

Ke depan, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya meningkatkan kinerja dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sehingga memberikan hasil terbaik kepada masyarakat. Kami berharap dukungan dari seluruh pihak, saran dan masukan serta kritikan agar kelemahan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat diperbaiki dan peningkatan kinerja dapat tercapai secara maksimal.

Wassalam

Sekretaris DPRD
Provinsi Sumatera Barat

H. RAFLIS, SH, MM

Sambutan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat



Perjalanan pemerintahan daerah di tahun 2023 akan dihadapkan kepada berbagai tantangan yang tidak bisa dikatakan ringan. Pengaruh dari gonjang-ganning ekonomi global harus menjadi perhatian serius agar dampaknya tidak sampai menimbulkan guncangan yang berimbas kepada kemerosotan ekonomi rakyat.

DPRD sangat menyadari kondisi keuangan daerah yang belum stabil setelah diterpa pandemic Covid-19 sehingga tetap bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan terutama yang berkaitan dengan keuangan daerah. Pemerintah daerah juga diminta untuk memperhatikan berbagai kemungkinan yang akan timbul akibat dampak ekonomi global sehingga diperlukan persiapan melalui berbagai Langkah antisipasi. Sementara itu, kondisi inflasi daerah yang masih belum stabil juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah Bersama instansi terkait melalui Langkah-langkah pengendalian yang efektif, optimal dan tepat sasaran.

Mengawali tahun 2023, DPRD dalam pelaksanaan tugas legislasi telah melakukan pembahasan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan di antaranya sudah ada yang bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sedangkan beberapa Ranperda lainnya masuk ke dalam tahap pembahasan dan uji publik. Dalam pembentukan produk hukum daerah tahun 2023 ini DPRD menggunakan hak usul Prakarsa untuk ikut membuat beberapa Ranperda yang

dinilai penting dan dibutuhkan sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat, seperti mengenai kebencanaan, hingga persoalan tanah ulayat.

DPRD Provinsi Sumatera Barat juga memberikan perhatian serius terhadap munculnya wacana penurunan status Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Dalam hal ini, DPRD bersikap tidak menyetujui dan akan berupaya secara maksimal agar status BIM tidak turun grade. Penurunan status tersebut akan membawa kerugian kepada daerah karena saat ini Sumatera Barat tengah mencanangkan tahun kunjungan wisata yang mana membutuhkan akses langsung untuk wisatawan manca negara. Selain itu, aktivitas ekonomi melalui jalur transportasi udara dari luar negeri juga sudah mulai menggeliat sehingga sangat merugikan jika status BIM dialihkan menjadi bandara untuk penerbangan domestik.

Mempersiapkan diri menjalankan tugas kedewanan, DPRD pada awal tahun 2023 juga telah Menyusun Kode Etik yang merupakan pedoman perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislative dan representasi masyarakat. Penyusunan Kode Etik tersebut dilakukan karena dinamika penyelenggaraan pemerintahan, dimana kode etik yang lama tidak berlaku lagi seiring dengan dihapusnya peraturan yang menaunginya, sehingga diperlukan

penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

Sementara itu dalam fungsi pengawasan, DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan daerah dapat berjalan maksimal, efektif dan efisien. DPRD terus mendorong pemerintah daerah bekerja secara professional dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan melalui APBD. Diharapkan, ketatnya pengawasan DPRD akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Demikian sambutan ini kami sampaikan, dengan memohon doa kepada masyarakat luas agar DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat terus meningkatkan kinerja dalam tugas pengabdian sebagai wakil rakyat, mengawal setiap program pembangunan daerah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, mengawasi jalannya roda pemerintahan serta mewujudkan aspirasi masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Wassalam.

Supardi
Ketua DPRD
Provinsi Sumatera Barat

Seminar Tiga Ranperda

Membuka Ruang Publik Untuk Penyempurnaan Produk Hukum

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar seminar atau konsultasi publik terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu-Kamis (11-12 Januari 2023) di gedung dewan. Seminar tersebut dilaksanakan dalam rangka membuka ruang bagi penyempurnaan ke tiga

Ranperda yang di antaranya merupakan Ranperda usul prakarsa DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah tersebut sehingga aplikatif setelah ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Tiga Ranperda yang diseminarkan tersebut yakni Ranperda tentang Tanah Ulayat, Ranperda tentang Tata Kelola

Komoditi Unggulan Perkebunan dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana. Digelar secara terpisah, narasumber yang diundang untuk menjadi pemateri dalam seminar tersebut merupakan para pakar yang kompeten sesuai kapasitas, bidang keahlian dan keilmuannya yang berkaitan dengan ke tiga Ranperda.



Seminar Ranperda tentang Tanah Ulayat

Ranperda tentang Tanah Ulayat lahir dari penggunaan hak usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam pembentukan produk hukum daerah. Seminar Ranperda tentang Tanah Ulayat menghadirkan narasumber antara lain Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat Fauzi Bahar, pejabat Kementerian ATR/ BPN dan pejabat Kementerian Dalam Negeri, akademisi Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Andalas dan Ketua Tim Penyusunan Ranperda tentang Tanah Ulayat, Sawal yang merupakan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dalam seminar tersebut, Ketua Tim Penyusun Ranperda tentang Tanah Ulayat DPRD Provinsi Sumatera Barat Sawal menerangkan, dasar pemikiran dari penyusunan regulasi tersebut adalah bahwa tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat merupakan identitas, petunjuk sekaligus faktor pengikat kekerabatan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hak ulayat ini juga yang memunculkan kearifan dan kebijaksanaan masyarakat dalam melahirkan tata aturan hukum adat terutama dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah adatnya. Selain juga mengatur peruntukan serta fungsi agar terjadi keseimbangan antara manusia dengan alam.

"Namun seringkali dalam perjalanannya keseimbangan yang telah dibangun oleh masyarakat hukum adat tersebut berbenturan dengan kebijakan pertanahan yang dilahirkan pemerintah, yang

berpotensi menimbulkan konflik sosial sehingga dibutuhkan sebuah peraturan daerah yang bisa memberikan perlindungan, rasa aman, serta jaminan terhadap pemenuhan termasuk pemulihan hak ulayat," katanya.

Dia mengungkapkan, terkait tanah ulayat sebelumnya Sumatera Barat sudah memiliki sebuah peraturan daerah. Namun, Perda tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan regulasi serta perlindungan terhadap tanah ulayat dimaksud.

"Dengan disusunnya Ranperda tentang Tanah Ulayat oleh DPRD melalui Komisi I ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat hukum adat terkait hak-hak ulayat tersebut," ucapnya.

Menurut Sawal, dalam proses penyusunan Ranperda tentang Tanah Ulayat, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat di beberapa daerah, salah satunya di Kabupaten Agam. Tujuannya adalah untuk menghimpun berbagai data yang dibutuhkan terkait tanah ulayat bisa merangkum kepentingan masyarakat di dalam peraturan daerah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar memaparkan, ada tujuh prinsip dalam masyarakat hukum adat di Minangkabau, salah satunya adalah tanah ulayat.

"Dalam Tambo adat Minangkabau, tanah ulayat prinsipnya Aianyo buliah diminum nan batang tatap tingga, artinya tanah ulayat hanya dibolehkan hak

pakai atau dimanfaatkan sementara keutuhan sebagai pusako (pusaka) tetap dipertahankan," katanya.

Dia melanjutkan, ada prinsip dalam pemanfaatan tanah ulayat, yakni salamo gagak hitam, salamo aia hilia, salamo awan putih yang dikunci dengan kato dulu ditapati, kato kudian, kato bacari.

"Artinya pemanfaatan tanah ulayat tetap bisa dilaksanaka jika perjanjian antara pemilik tanah ulayat dan pemakai berpegang kepada perjanjian. Ketika masa perjanjian habis maka harus diperbaharui oleh ke dua belah pihak, Tidak boleh BPN saja atau antara pengusaha yang memakai dengan penguasa saja tanpa sepengetahuan penghulu dari kaum pemilik hak tanah ulayat," ujarnya.

Selanjutnya, terkait pembagian hasil pemanfaatan tanah ulayat, di dalam tambo adat juga disebutkan ka rimbo babungo kayu, ka laui babungo karang, ka sawah babungo ampiang, ka aia babungo pasia, ka tambang babungo ameh. Artinya, setiap macam kandungan dan setiap macam lokasi tanah ulayat sudah ditetapkan pembagiannya menurut adat secara jelas untuk pemilik tanah ulayat.

Prinsip yang tak kalah penting yakni tentang perubahan status tanah ulayat, dalam tambo dikatakan : tanah ulayat di Minangkabau dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando. Artinya, tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan, kecuali disebabkan ketentuan adat yang empat. T





Seminar Ranperda Tata Kelola Komoditi Perkebunan Akademisi Paparkan Kelemahan Sumbar

Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memiliki empat komoditas perkebunan potensial yang bisa menjadi unggulan dan memiliki pangsa pasar ekspor yang luas. Empat komoditi tersebut adalah gambir, karet, kakao dan kelapa sawit. Sayangnya saat ini komoditas unggulan tersebut makin susah berkembang, petani pun sering mengalami kesulitan ekonomi.

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Indra Dwipa yang hadir dalam seminar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Rabu (11/1/2023) menuturkan hal

tersebut. Menurutnya, empat komoditi unggulan itu perlu “diselamatkan” karena mampu menjadi penyokong perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah.

“Contohnya gambir di mana 80 persen kebutuhan gambir dunia dipasok dari Sumbar namun petani gambir banyak yang mengalami kesulitan ekonomi, ini harus diselamatkan,” kat Indra Dwipa.

Dia juga mengungkapkan tentang kakao, Ketika Muhammad Jusuf Kalla menjadi wakil presiden RI pada tahun 2006 pernah mencanangkan Sumbar sebagai sentra kakao. Pada saat itu bahkan menjadi salah satu daerah penghasil kakao terbesar di Indonesia. Namun, saat ini, budidaya

kakao di Sumatera Barat semakin berkurang, perkebunan kakao sudah banyak yang dibiarkan terlantar tak terurus.

Dia memaparkan sejumlah permasalahan umum yang terjadi pada sektor perkebunan di Sumatera Barat. Indra memaparkan pertama mengenai harga di tingkat petani yang sering dikendalikan tengkulak sehingga dijual rendah. Kemudian alur tata niaga komoditi yang terlalu panjang sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

“Belum ada regulasi yang mengatur tata Kelola maupun tata niaga komoditi serta minimnya penyuluhan, termasuk juga tidak ada SKPD yang khusus untuk perkebunan juga menjadi faktor yang



berpengaruh terhadap pelemahan sektor ini,” lanjutnya.

Dia menegaskan, harus ada jaminan harga melalui regulasi serta peta jalan yang jelas melalui instansi yang khusus untuk fokus ke sektor perkebunan. Sehingga, pengembangan budaya perkebunan dapat berjalan secara optimal dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penyuluhan juga harus dilakukan secara maksimal agar petani memiliki pengetahuan yang baik dalam hal budidaya komoditi. Bagaimana menanam dan merawat tanaman hingga mulai menghasilkan serta memiliki kualitas produksi yang baik. Komoditi yang berkualitas akan memiliki harga jual lebih tinggi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Suwirpen Suib saat membuka seminar publik tersebut mengatakan, DPRD melalui komisi II Menyusun Ranperda tersebut bertujuan untuk menjadi payung hukum dalam penatakelolaan komoditi unggulan perkebunan. Diharapkan, mampu menjawab kebutuhan petani terutama dalam mengatasi permasalahan dalam mengelola dan memasarkan hasil panen.

“Kita berharap ini bisa menjadi pendorong terciptanya optimalisasi di sektor perkebunan sehingga kesejahteraan petani akan meningkat dan perekonomian daerah bisa bergerak lebih cepat,” ungkapnya.

Suwirpen memaparkan ada sejumlah tujuan yang diharapkan tercapai dengan pembentukan Ranperda tersebut, yakni meningkatkan kualitas dan daya saing komoditi unggulan perkebunan di pasar domestik maupun global. Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, menyelaraskan hubungan antara produsen dan perusahaan pengolah komoditas, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani. Kemudian menjamin kelangsungan usaha di bidang perkebunan dan memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha terkait komoditas unggulan.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Ranperda Tata Kelola Komoditi Perekembangan Unggulan DPRD Provinsi Sumatera Barat Bakri Bakar mengatakan, melalui seminar tersebut diharapkan dapat menghimpun banyak masukan dari berbagai pihak sehingga regulasi yang dihasilkan nantinya mampu menjadi pendorong terwujudnya kemajuan daerah di sektor perkebunan dan menyejahterakan petani.

“Seminar publik ini menghadirkan akademisi, pelaku usaha sektor perkebunan dan berbagai asosiasi terkait dan lainnya untuk dapat menghimpun masukan yang dibutuhkan untuk penyempurnaan dari Ranperda yang saat ini sedang dibahas itu,” ujarnya.

Selain seminar, pihaknya juga telah melakukan berbagai tahapan untuk tujuan penyempurnaan materi dan muatan Ranperda. Antara lain melakukan konsultasi ke kementerian terkait, studi banding ke beberapa daerah serta peninjauan lapangan ke kabupaten dan kota yang potensial sebagai sentra komoditi perkebunan.

“Dengan menghimpun segala masukan dan informasi dari berbagai pihak kami berharap Ranperda ini selesai pada tahun 2023 dan bisa segera diterapkan di Sumbar,” tandasnya.T



Seminar Ranperda Penanggulangan Bencana

Inisiatif DPRD Sumbar Optimalkan Penanganan Dampak Bencana

Menggantikan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2007 yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan penanganan dampak bencana, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menginisiasi Ranperda baru. Rencana awal, Perda tersebut hanya akan direvisi namun cakupan materi dan muatan yang harus diubah mencapai lebih dari 50 persen maka Langkah terbaik adalah mengganti dengan produk hukum baru.

Ketua Tim Penyusun Ranperda tentang Penanggulangan Bencana DPRD Provinsi Sumatera Barat H. M. Nurnas menjelaskan hal tersebut dalam seminar yang digelar pada Kamis (2/1/2023).

"Awalnya hanya akan dilakukan revisi terhadap Perda yang lama namun setelah melihat cakupan yang harus diubah lebih dari 50 persen materi dan muatan maka DPRD menginisiasi lahirnya Perda baru untuk menggantikan Perda yang lama tersebut," kata Nurnas.

Dia menerangkan, Perda nomor 5 tahun 2007 sudah tidak sesuai lagi

dalam memenuhi kebutuhan payung hukum dalam penanggulangan dampak bencana dalam kondisi saat ini. Sedangkan untuk melakukan revisi juga tidak efektif karena materi yang akan diubah lebih banyak untuk menyesuaikan dengan kondisi kekinian dalam penanganan bencana.

"Sesuai aturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah maka DPRD memutuskan untuk membuat Perda baru agar menjawab kebutuhan regulasi dalam penanganan bencana," ujarnya.

Dia memaparkan, Sumatera Barat memiliki potensi rawan bencana baik bencana alam maupun non alam. Potensi bencana alam seperti banjir, longsor, abrasi pantai hingga tsunami, bencana gempa bumi, angin puting beliung dan lainnya. Bencana non alam pun berpotensi terjadi seperti wabah penyakit dan sebagainya.

Dia menjelaskan, secara garis besar ada beberapa hal yang diharapkan tercapai dengan lahirnya Ranperda tersebut. Antara lain

memperjelas definisi status bencana, baik itu bencana alam maupun non alam, sehingga penanggulangan bisa menjadi efektif mulai dari mitigasi, penanganan saat kejadian maupun penanganan pascabencana bisa disesuaikan dengan status tersebut.

Kemudian, Perda tersebut juga untuk memperkuat status Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai koordinator mitigasi dan tanggap darurat penanggulangan bencana. Memperjelas anggaran kebencanaan baik dalam mitigasi, tanggap darurat maupun pascabencana.

"Selain itu juga bagaimana untuk mengaitkan atau memanfaatkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana," kata Nurnas.

Komisi IV DPRD Sumbar, lanjutnya, berharap Ranperda tersebut nantinya bisa menjadi pedoman dalam penanggulangan bencana untuk meminimalisir dampak bencana dengan mitigasi dan penanggulangan yang terarah.

Seminar Ranperda Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan tersebut menurut



Nurnas adalah untuk menerima masukan dan tanggapan publik. Menghadirkan berbagai pihak dengan narasumber yang berkompeten dalam penanganan bencana diharapkan dapat menjadi penyempurnaan terhadap Ranperda yang digagas tersebut.

Dalam kesempatan itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan menyambut baik rencana penyusunan dan penyempurnaan Perda tentang Penanggulangan Kebencanaan itu. Harmensyah dari BNPB saat memaparkan materi sebagai narasumber mengatakan seluruh provinsi perlu memiliki Perda tersebut.

Dia memaparkan, ada beberapa hal yang perlu ada di dalam Perda Penanggulangan Bencana, diantaranya aturan terkait pembangunan infrastruktur tangguh bencana.

"Setidaknya bisa dimasukkan dalam persyaratan pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Bukan

hanya tangguh tapi bangunan bisa juga dioptimalkan sebagai shelter," katanya.

Kemudian di dalam perda perlu pula memuat tentang budaya sadar bencana. Sehingga di saat bencana terjadi masyarakat sudah spontan mengikuti prosedur penyelamatan diri. Lalu perlu pula memuat tentang aturan terkait informasi resiko bencana. Selain itu juga mengatur tentang keberadaan sistem peringatan dini multibencana.

Narasumber lainnya, Rusnadi Rahmat dari Pusat Kajian Kebencanaan Universitas Negeri Padang (UNP) mengatakan, potensi kebencanaan di Sumbar sangat besar. Ada beberapa potensi yakni gempa bumi, tsunami, abrasi, abrasi, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, kekeringan, banjir, tanah longsor, likuifaksi, epidemi dan wabah penyakit.

"Untuk gempa paling besar potensinya di tiga daerah yakni Padang, Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai," ujarnya.

Menurutnya, risiko gempa di Sumbar tak kalah besar dibanding Jepang. Untuk itu dia menyambut baik penyempurnaan dan penyusunan perda baru tentang penanggulangan bencana yang saat ini sedang dilakukan Komisi IV DPRD.

Rusnadi menyampaikan sejumlah masukan yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan ranperda ini. Pertama, perlu masing-masing BPBD di kabupaten/kota/provinsi memiliki kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan simulasi. Penting pula persiapan untuk perencanaan yang terarah, terpadu dan terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.

Selain itu, perlu peningkatan kinerja antar lembaga dan instansi sehingga profesional dengan pencapaian yang terukur dan terarah. Tak kalah penting, perlu adanya pembangunan dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga mampu melindungi masyarakat. T



Perda Tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Ditetapkan

Pemerintah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat telah menyepakati untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan menjadi peraturan daerah (Perda). Kesepakatan Bersama itu dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Jumat (6/1/2023).

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi, memimpin rapat paripurna menyampaikan, dengan adanya Perda tersebut diharapkan pembangunan daerah ke depan dapat lebih terarah sesuai dengan target pembangunan infrastruktur yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

“Perda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan ini bisa menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan daerah sehingga lebih terarah sesuai dengan RPJMD dan RPJPD,” katanya.

Dia berharap, dengan telah ditetapkannya Perda tersebut, gubernur segera menyikapi dengan Menyusun dan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Sehingga, Perda Infrastruktur yang telah ditetapkan itu bisa langsung diterapkan dalam menunjang program pembangunan daerah ke depan.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumbar Zulkenedi Said mengatakan, penyusunan Ranperda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan sesuai dengan amanat penyelenggaraan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

“Pembangunan infrastruktur yang layak, memadai dan berkelanjutan merupakan kebutuhan mendasar untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional yakni dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan menyejahterakan masyarakat daerah,” ujarnya.

Zulkenedi menambahkan, pada prinsipnya pembangunan infrastruktur di Sumbar dibagi menjadi enam garis besar, yakni pembangunan infrastruktur energi terbarukan, pembangunan infrastruktur bangunan gedung, pembangunan infrastruktur sumber daya air, pembangunan infrastruktur

jalan dan jembatan, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi serta pembangunan infrastruktur perhubungan.

"Pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah yang komprehensif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut guna menciptakan iklim investasi yang baik demi peningkatan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Selain itu, tambah Zulkenedi, penyusunan Perda tentang Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan secara sosiologis juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan infrastruktur antar kabupaten/ kota, mengantisipasi kemungkinan terjadi berbagai krisis serta mencapai kemandirian kebutuhan energi.

"Perda ini diharapkan bisa menjadi regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di daerah," tambahnya.

Menurutnya, dengan adanya suatu regulasi baru dalam bentuk Perda yang dapat mengakomodir berbagai permasalahan terkait pembangunan infrastruktur di Sumbar, diharapkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan lebih cepat. Zulkenedi memaparkan di dalam Perda tersebut diatur berbagai hal terkait dengan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, yakni terkait pengaturan mengenai perencanaan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, kerjasama, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan evaluasi, peran serta masyarakat dan pendanaan.

Dalam penyusunan Perda tersebut, Komisi IV DPRD Sumbar telah melaksanakan berbagai agenda pembahasan. Mulai dari rapat internal komisi IV, rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, studi banding dan konsultasi teknis ke kementerian PU&PR, Bapennas dan Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan konsultasi teknis tersebut diperoleh beberapa hal diantaranya, penambahan pada konsideran menimbang yaitu percepatan pembangunan dan pemanfaatan serta peluang pembiayaan infrastruktur. Kemudian pada Bab 2 terdiri dari dua yakni perencanaan pembangunan infrastruktur baru dan perencanaan pembangunan infrastruktur yang belum selesai.

"Hasil fasilitasi Kemendagri telah keluar sejak April 2022. Namun OPD baru menyerahkannya pada Desember 2022," ujarnya.

Perbaikan terkait hasil fasilitasi tersebut membuat adanya sejumlah perubahan, seperti penambahan pasal dari 40 menjadi 41 serta penambahan Bab 8 tentang Sanksi. Kemudian, pada ketentuan mengingat yang sebelumnya masih menggunakan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1998 tentang pembentukan daerah-daerah sementara tingkat 1 Sumatera Barat, Riau dan Jambi disesuaikan oleh tim dengan undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. (TT)



Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pokok - Pokok Kebudayaan Sumatera Barat resmi menjadi Ranperda Usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penetapan Ranperda tersebut dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (30/1/2023).

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi menjelaskan, Ranperda Pokok - Pokok Kebudayaan Sumatera Barat diinisiasi oleh DPRD melalui komisi V. Namun, Ranperda yang sudah masuk ke dalam Program Pembentukan Daerah (Propemperda) tahun 2023 itu mengalami perubahan nama menjadi Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

"Berdasarkan hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), salah satunya adalah penggunaan judul yang lebih tepat yaitu Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah," kata Supardi.

Supardi menerangkan, kebudayaan merupakan salah satu bidang yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kerangka perencanaan pembangunan. Baik pembangunan nasional maupun daerah, maupun dalam praktik kehidupan sehari-hari.

"Kebudayaan melekat dalam setiap individu atau kelompok yang merupakan ekspresi dari kompleksitas kehidupan. Wujud dari kebudayaan dapat berupa benda yang tampak (tangible) dan hal yang tak



Ranperda Pokok-Pokok Kebudayaan Jadi Usul Prakarsa DPRD Sumbar

tampak (intangible)," jelasnya.

Menurut Supardi, dalam konteks Sumatera Barat, bentuk-bentuk hasil kebudayaan dapat ditemukan dalam beragam bentuk. Mulai dari warisan budaya yang dihasilkan beriringan dengan sejarah masyarakat, pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan, ekspresi seni, hingga karya-karya kontemporer. Seluruh bentuk dan nilai yang ada dalam kebudayaan itu perlu dijaga dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

Lebih jauh menurutnya, Sumatera Barat memiliki karakteristik adat dan budaya Minangkabau. Berdasarkan kepada nilai falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat atau nagari, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan

ketinggian adat istiadat. Sumatera Barat dapat diidentikkan dengan Minangkabau dan Islam.

dalam rapat paripurna tersebut Supardi memaparkan dasar pertimbangan digagasnya Ranperda tentang Pokok-pokok Kebudayaan Sumatera Barat yang selanjutnya berjudul Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah. Menurutnya, dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Sumatera Barat disebut bahwa garis besar permasalahan kebudayaan di Sumatera Barat adalah tergerusnya eksistensi kebudayaan lokal akibat pengaruh globalisasi.

PPKD melihat salah satu kesulitan disebabkan belum adanya regulasi khusus mengenai kebudayaan. Namun dalam dokumen yang sama, belum nampak arah yang jelas terkait upaya mengatasi hal tersebut. Demikian juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sumatera Barat tahun 2021-2026. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan sehingga diajukannya usul rakarsa.

Dengan telah ditetapkannya Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah tersebut maka selanjutnya Ranperda itu sudah dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan. Ranperda tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada gubernur untuk disepakati proses pembahasannya, dan kepada Komisi V untuk dapat menyiapkan nota penjelasannya.

Sekretaris Provinsi Sumatera Barat Hansasri dalam kesempatan itu menyatakan pemerintah provinsi pada dasarnya menyambut baik digagasnya Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah tersebut. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjaga kelestarian kebudayaan daerah sekaligus membawa kemajuan bagi Sumatera Barat. F



Ranperda Ekonomi Kreatif Disetujui

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan terhadap Ranperda itu ditandatangani dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (28/2/2023).

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinady mengatakan, pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia diharapkan menjadi salah satu sektor yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dia juga mengatakan, dengan adanya Perda Ekonomi Kreatif, Sumatera Barat dapat semakin meningkatkan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam bagi pelaku ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

"Ranperda ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah melalui peningkatan daya

saing dan kreativitas, mendorong pemanfaatan berbagai potensi daerah menjadi sumber ekonomi," kata Audy.

Secara umum, Audy memaparkan, Perda Ekonomi Kreatif memuat kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan serta mendorong kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan berbagai potensi untuk dijadikan sumber ekonomi. Bagaimana pelaku ekonomi kreatif dapat berkembang dengan baik, serta membuat peta jalan untuk subsektor ekonomi tersebut sehingga pemerintah daerah dapat menyusun program pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi, dalam sambutan pembuka rapat paripurna menyampaikan, banyak potensi yang bisa dikembangkan atau dimanfaatkan menjadi sumber ekonomi oleh masyarakat. Baik sumber daya alam maupun lainnya seperti potensi seni dan budaya

dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi untuk mendatangkan penghasilan.

"Berbagai potensi itu dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat, namun pengelolaannya harus optimal, terarah dan berkelanjutan," kata Supardi.

Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Tim Pembahas Ranperda Ekonomi Kreatif DPRD Provinsi Sumatera Barat Daswippetra menjelaskan, pada tahap pembahasan terjadi beberapa perubahan terhadap muatan Ranperda tersebut. Perubahan dilakukan setelah Komisi V melakukan pendalaman Bersama OPD terkait serta memperhatikan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri.

"Pada rancangan awal Ranperda ini terdiri dari 10 Bab dengan 80 pasal, setelah pendalaman dan memperhatikan hasil fasilitasi dari Kemendagri bertambah menjadi 12 Bab dengan 94 pasal," katanya. F



Sekretariat DPRD Sumbar Wakil Provinsi di Ajang Keterbukaan Informasi Nasional

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menjadi wakil provinsi dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi tingkat nasional tahun 2023 untuk kategori Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemprov. Anugerah bernama Anindya Tinarbuka (Harapan Keterbukaan) itu merupakan bagian dari acara peringatan Hari Keterbukaan Informasi Tahun 2023 yang akan dilaksanakan di Kampar, Riau pada 4 Mei 2023 mendatang.

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Rafli menyebutkan, hal itu merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tantangan mendapatkan amanah mewakili pemerintah provinsi untuk kategori SKPD. Sekretariat DPRD Sumbar akan melakukan presentasi di hadapan para penilai dari Komisioner Komisi Informasi Pusat, Kemenpan RB, Kemendagri dan akademisi pada 9 Maret 2023 nanti.

“Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat terus berupaya memaksimalkan penerapan keterbukaan informasi sesuai dengan amanah undang-undang, dan

merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan dipercaya menjadi wakil dalam ajang ini,” kata Rafli, Rabu (22/2/2023).

Rafli memaparkan, Hari Keterbukaan informasi merupakan peringatan atas disahkannya undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Memperingatinya, Komisi Informasi Pusat akan melaksanakan monitoring untuk memetakan setiap badan publik yang memiliki inovasi dalam mendorong tumbuhnya budaya keterbukaan informasi.

“Dalam ajang anugerah Tinarbuka tersebut nanti akan diberikan anugerah kepada SKPD demi menumbuhkan kepercayaan masyarakat, memotivasi seluruh lembaga dan menjadi duta keterbukaan informasi,” ujarnya.

Untuk mengikuti penilaian dalam rangka anugerah keterbukaan informasi tingkat nasional tersebut, menurut Rafli ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Antara lain pimpinan SKPD menjabat minimal satu tahun, tidak terkena perkara hukum khususnya berkaitan

dengan sengketa informasi publik.

Selanjutnya, membuat pernyataan kesiapan untuk mengikuti tahapan penilaian dengan mengirim formulir, menyampaikan makalah singkat serta menyampaikan profil SKPD dan Pimpinan. Kemudian menyampaikan video berdurasi maksimal lima menit berisi inovasi-inovasi keterbukaan informasi seperti program keterbukaan informasi, anggaran, ketersediaan data dan atau pengadaan barang jasa. Inovasi yang sudah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Sumbar saat ini adalah menyediakan fasilitas Pojok Baca Digital (Pocadi), menyediakan aplikasi asik (aspirasi publik), aplikasi kube (kumpulan berita), kios layanan PPID dan kios layanan JDIIH.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat merupakan OPD dengan Predikat Terinformatif tahun 2021 dan 2022. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Rafli juga meraih penghargaan sebagai Achievement Motivation Person dalam Anugerah Keterbukaan Informasi tahun 2022. F



Supardi: Kapasitas Kepsek dan Guru Menentukan Mutu Lembaga Pendidikan

Kapasitas kepemimpinan seorang kepala sekolah akan sangat menentukan dalam peningkatan mutu pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Selain itu, optimalisasi peran guru juga ikut mendukung tercapainya pendidikan yang berkualitas.

Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi saat menerima kunjungan Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud Ristek Dikti) Putra Asga, Selasa (28/2).

“Untuk menentukan kualitas pendidikan di suatu sekolah, terutama sekali adalah kemampuan kepala sekolah, kemudian ditunjang oleh optimalisasi peran guru dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut,” kata Supardi.

Untuk itu, lanjutnya, jabatan kepala sekolah hendaknya diamanahkan kepada seorang yang benar-benar berkompeten dan berkualitas sesuai dengan keahliannya. Tidak berdasarkan kedekatan atau lobi-lobi dengan pihak tertentu, tidak juga berdasarkan suka atau tidak suka kepada seseorang.

“Kami yakin jika hal ini diperhatikan ketika rekrutmen kepala sekolah dan pengangkatan guru, kualitas pendidikan di Sumatera Barat akan terus

meningkat,” ujarnya.

Dia menegaskan, profesi guru dan jabatan kepala sekolah harus diemban oleh orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan pendidikan. Pencapaian target kurikulum dan keberhasilan yang diraih siswa dalam pembelajaran harus menjadi suatu hal yang sejalan sehingga keberhasilan proses belajar mengajar terukur dan terarah.

Terkait kurikulum merdeka belajar, Supardi meminta agar Kemendikbud Ristek Dikti mengencangkan sosialisasi penerapannya sehingga dipahami oleh tenaga pendidik di seluruh satuan pendidikan. Kemudian, perkembangan teknologi informasi yang semakin maju mau tidak mau menyebabkan pergeseran pola pembelajaran mengikuti perkembangan tersebut. Hendaknya guru-guru juga harus menguasai penerapan teknologi yang mumpuni.

Dalam kesempatan itu, Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Dikti Putra Asga mengungkapkan apresiasi atas semangat Pemerintah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan Program Merdeka Belajar. Dia mengaku, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka menyukseskan program tersebut.

Dia mendorong pemerintah daerah bersama DPRD untuk menyusun regulasi turunan untuk

transformasi pendidikan sebagai tolok ukur dari penerapan kurikulum merdeka belajar dimaksud. Dia mengakui masih banyak penyempurnaan yang harus dilakukan agar guru dan tenaga pendidik serta satuan pendidikan lebih optimal dalam pencapaian kurikulum dan pencapaian prestasi siswa secara seimbang.

“Salah satu yang dirasakan masih menjadi persoalan adalah banyaknya materi yang harus dikejar untuk optimalisasi kinerja, ini kami rencanakan akan dipangkas agar ada ruang bagi kepala sekolah dan guru untuk melakukan inovasi dalam rangka optimalisasi pencapaian prestasi siswa,” ujarnya.

Putra menambahkan, saat ini Kemendikbud Ristek Dikti juga telah melaksanakan program Pendidikan Guru Penggerak yaitu program pendidikan kepemimpinan bagi guru. Program dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) sehingga selama mengikuti guru tetap dapat melaksanakan aktivitas mengajar. Pelaksanaan program antara lain lokakarya, konferensi dan pendampingan yang berlangsung selama sembilan bulan.

“Program ini bertujuan sebagai persiapan bagi guru untuk menjadi kepala sekolah yang benar-benar profesional dan memiliki kemampuan dalam pengembangan satuan pendidikan yang dipimpinnya,” tutupnya. F



Sekretariat DPRD Sumbar Sosialisasi Aplikasi Dashboard Pembangunan

Bertujuan untuk meningkatkan kinerja, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan sosialisasi tata cara penginputan dan pelaporan realisasi real time pada Aplikasi Dashboard Pembangunan Sumbar, Kamis (16/2) di gedung DPRD. Diharapkan, aparatur sipil negara (ASN) dapat meningkatkan kemampuan dalam bekerja dengan bantuan sentuhan digital.

Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis mengatakan, tugas ASN di Sekretariat DPRD adalah mendukung kinerja kedewanan, baik itu anggota maupun pimpinan dewan. "Indeks kinerja kedewanan yang difasilitasi oleh sekretariat harus diinput melalui platform Dashboard Pembangunan Sumbar, dengan demikian masyarakat bisa mengetahui sejauh mana perkembangan daerah ini," ujar Raflis.

Dia menambahkan, keberadaan

aplikasi Dashboard Pembangunan Sumbar juga akan meningkatkan kepatuhan sekretariat DPRD terhadap amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nantinya pada aplikasi itu akan tersaji berbagai informasi dan laporan terkait pembangunan Sumbar.

"Kami akan menyajikannya dalam aplikasi ini berupa laporan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunannya. Tidak ada data atau informasi yang akan ditutup-tutupi karena keterbukaan informasi sudah menjadi perintah undang-undang yang harus diikuti oleh semua badan publik," katanya.

Raflis yang dalam sosialisasi itu menjadi salah seorang narasumber menerangkan, agar aplikasi tersebut sesuai dengan target dan harapan, maka ASN harus menguasai pengelolaannya, termasuk cara input data. Menurutnya, saat ini DPRD Sumbar merupakan lembaga yang

mendapat predikat terbaik dari Komisi Informasi (KI) Sumbar dalam hal keterbukaan informasi.

"Dengan predikat informatif yang sudah diperoleh sekretariat, bukan berarti inovasi dan peningkatan berhenti dilakukan. Justru harus ada gebrakan baru untuk menyajikan informasi secara lebih terbuka. Selain juga melakukan pelaporan yang benar," tambahnya.

Sementara itu, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumbar Zardi Syahrir mengatakan, semua sistem dalam pelaporan informasi harus dikelola dengan cermat. Seluruh pengelola harus mempelajari dengan seksama, sehingga tidak ada permasalahan dalam pelaporan.

"Semua program pelaporan dan lainnya memang harus dipelajari dengan cermat. Apalagi program ini akan dipergunakan secara rutin dan datanya akan beredar secara luas," terang Zardi. (TT)



Mencari Pembandingan Penyusunan APBD Banggar DPRD Jambi Berkunjung ke Sumbar

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi berkunjung ke DPRD Sumatera Barat, Rabu (22/2/2023). Kunjungan itu bertujuan untuk mencari pembandingan efektivitas mekanisme penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang saat ini sudah mengacu kepada peraturan terbaru.

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Rafliis yang menerima kunjungan tersebut menjelaskan, mekanisme penyusunan APBD oleh DPRD Sumatera Barat sudah mengacu pada aturan terbaru.

"Banggar DPRR dan dibantu oleh staf sekretariat selalu memastikan terlebih dahulu apakah ada perubahan pedoman, kebijakan dan peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Penyusunan anggaran tetap berdasarkan regulasi yang terbaru, baik undang-undang

maupun peraturan pemerintah agar tidak ada permasalahan di kemudian hari," katanya.

Menurut Rafliis, selain mengacu pada aturan terbaru, penyusunan APBD dilakukan dengan memperhatikan ketepatan anggaran, prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Dalam penyusunan, DPRD Sumbar selalu melakukan komunikasi untuk berkoordinasi kepada kementerian terkait baik secara langsung maupun melalui telepon.

"Proses penyusunan harus dipastikan apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, kami selalu melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan hal itu agar tidak menyalahi ketentuan," ulasnya.

Anggota Banggar, DPRD Provinsi Jambi Wartono Triyan Kusumo mengatakan, penyusunan APBD

merupakan salah satu tugas utama DPRD dalam menjalankan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk mendapatkan pola penyusunan yang tepat, pihaknya mencoba mencari pembandingan ke Sumatera Barat agar mendapatkan mekanisme yang efektif dan berdampak lebih baik terhadap percepatan program pembangunan daerah.

"Pola penyusunan yang efektif menjadi salah satu tolok ukur kinerja DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kami berharap masukan dari DPRD Sumatera Barat dapat diterapkan untuk penyempurnaan kinerja tersebut," tandasnya. T



Komisi I DPRD Sumbar RDPU Bersama Komisi II DPR RI

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Maigus Nasir menerima kunjungan DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (10/11). Kunjungan itu antara lain bertujuan untuk berkonsultasi terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 84 tahun 2022 tentang Penyusunan APBD tahun 2023.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Darlius, Permendagri tersebut memberikan pengaruh terhadap arah kebijakan pembangunan daerah dalam penyusunan alokasi anggaran.

"Saat ini kami menghentikan sementara pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 agar tidak menyalahi ketentuan yang berlaku, hingga benar-benar memahami aturan tersebut," kata Darlius.

Dia menambahkan, Badan

Anggaran DPRD Kabupaten Limapuluh Kota terpaksa menghentikan sementara proses pembahasan disebabkan pemahaman terhadap Permendagri tersebut. Menurutnya, karena ada beberapa hal yang belum menemukan kesepakatan antara DPRD dengan pemerintah daerah, antara lain terkait pokok-pokok pikiran anggota DPRD.

"Ini salah satunya, pikir anggota DPRD belum diakomodir oleh pemerintah daerah karena pemahaman tersebut," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat Maigus Nasir menyampaikan beberapa masukan dan saran dengan memedomani apa yang telah dilakukan oleh DPRD bersama pemerintah provinsi dalam menyikapi Permendagri nomor 84 tahun 2022.

"Permendagri itu menjadi acuan dalam penyusunan APBD tahun 2023, Gubernur dan DPRD saling

mengingat agar arah kebijakan pembangunan daerah bisa terakomodir dengan tidak menyalahi ketentuan terbaru tersebut," kata Maigus.

Dia menegaskan, pokok-pokok pikiran anggota DPRD merupakan kewajiban yang harus masuk dalam penganggaran tiap tahun. Sudah ada aturan bahwa anggota DPRD harus melakukan pengabdian ke daerah pemilihan masing-masing, memperjuangkan aspirasi konstituennya.

"Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan realisasi dari aspirasi dan merupakan program pembangunan daerah yang sesuai kebutuhan masyarakat jadi harus tetap disikapi karena merupakan amanah undang-undang namun disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta prioritas pembangunan," katanya. T

Penyempurnaan Penyusunan Ranperda Tentang Tanah Ulayat Komisi I DPRD Sumbar Himpun Pendapat Masyarakat dan Tokoh Adat Agam

Untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) tentang Tanah Ulayat, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebagai tim pembahas mengunjungi Kabupaten Agam, Selasa (10/1). Kunjungan itu diterima oleh masyarakat dan seluruh unsur terkait di Kantor Bupati setempat, antara lain unsur ninik mamak, LKAM dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Agam.

Ketua Tim Pembahas Ranperda tentang Tanah Ulayat DPRD Provinsi Sumbar Desrio Putra mengatakan, kunjungan ke Kabupaten Agam merupakan upaya untuk memperkuat dan mempercepat pengesahan Ranperda. Dalam muatan Ranperda Tanah Ulayat, cara penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) akan diperkuat.

"Jika ditemui sengketa tanah ulayat untuk kepentingan umum maka itu bisa diberikan kelonggaran, hal itu dikarenakan tidak untuk kepentingan pribadi atau usaha. Contoh adanya sengketa ulayat dengan pemerintah dalam rangka optimalisasi kepentingan pelayanan masyarakat," katanya.

Dia mengatakan, Ranperda Tanah Ulayat juga akan memproduktifkan lahan adat yang tidak berfungsi sehingga bisa dikerjasamakan dengan badan usaha dengan perjanjian yang tertuang dalam HGU. Biasanya dalam kerjasama

yang telah disepakati akan disertai dengan persoalan, HGU memiliki jangka waktu dalam perjanjian antara 25 hingga 30 tahun.

"Jadi menurut peraturan yang baru setelah HGU habis, tanah ulayat yang dikelola akan kembali ke negara, jadi kita berharap ketika HGU habis tanah tersebut harus kembali kepada pemegang hak ulayat," katanya.

Dia mengatakan, kedudukan pemegang ulayat akan diperkuat dalam Ranperda, ketika perjanjian HGU selesai akan ada dua kemungkinan, yaitu diperpanjang atau pemegang hak mengalihkan lahan pada badan usaha lain. Jadi harus dijelaskan apakah hak untuk pemegang hak ulayat akan lebih besar atau sama seperti sebelumnya, dalam konteks ini harus mengenakan kepentingan umum.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib yang ikut mendampingi Komisi I, mengatakan Ranperda Tanah Ulayat ini begitu rumit dan tujuannya melindungi masyarakat dan tanah ulayat. Dia mengatakan Kabupaten Agam memiliki banyak permasalahan tanah ulayat namun dapat diselesaikan.

Ini berbeda dengan di tempat lain juga ada masalah namun malah melebar.

"Kita ingin meminta masukan dari tokoh adat dan masyarakat untuk memperkaya materi Ranperda ini," katanya.

Sekda Kabupaten Agam Edi Busti

mengatakan, terkait Ranperda Tanah Ulayat yang sedang dibahas oleh DPRD Provinsi Sumbar pihaknya berusaha untuk memberikan masukan dan saran. Namun bisa saja yang dilaksanakan di Kabupaten Agam akan berbeda dengan di daerah lain karena masing-masing daerah memiliki kebijakan atau aturan yang mungkin saja berbeda. Kabupaten Agam terdiri dari 92 nagari dari sebelumnya hanya 82 nagari. Kini ada 13 nagari cadangan dan total ada 105 nagari yang tersebar di 16 kecamatan.

"Terkait Ranperda, kami hanya memberi saran dan masukan sesuai yang dilaksanakan di sini, keunikan masing-masing nagari mungkin saja akan berbeda," katanya.

Sementara Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Agam Junaidi Dt Gampo Alam mengatakan, tanah ulayat tidak lepas dari ninik mamak dan penghulu. Menurutnya, tugas pokok fungsi ninik mamak adalah menjaga harta pusaka adat atau tanah ulayat dan memelihara anak kemenakan.

Sementara terkait konflik pertanahan, jamaknya cukup kompleks sehingga menuntut kesiapan ninik mamak dalam menyelesaikan persoalan tanah ulayat bisa saja terjadi dengan pemerintah, dengan aparat hukum, dengan investor maupun antar anak kemenakan. T





Mochklaslin: Pengelolaan Keuangan Daerah Harus Taat Aturan

Menerima kunjungan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Limapuluh Kota, Senin (13/2/2023), Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat Mochklaslin menegaskan, pengelolaan keuangan daerah harus sesuai aturan yang berlaku. Penyimpangan dari ketentuan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari yang bisa bermuara ke ranah hukum.

"Pengelolaan keuangan daerah harus mengacu kepada ketentuan, tidak boleh menyimpang dari aturan karena akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari," tegas Mochklaslin.

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Limapuluh Kota berkunjung ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mempelajari pola penyusunan dan pergeseran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Masukan dan saran

dalam kunjungan tersebut akan dijadikan pertimbangan untuk diterapkan di Kabupaten Limapuluh Kota agar dalam pengelolaan keuangan, DPRD dan pemerintah daerah tidak tersandung masalah hukum.

Menurut Mochklaslin, seluruh aturan yang berlaku menjadi rujukan dan acuan bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan. Termasuk juga dengan pergeseran anggaran mengacu kepada ketentuan dari Kementerian Keuangan dan ketentuan lainnya.

"Jika seluruh aturan tersebut dijadikan pedoman maka tidak akan ada persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam melakukan pergeseran mata anggaran," ujarnya.

Dia menambahkan, dalam melakukan penyusunan atau pergeseran anggaran, juga harus melakukan koordinasi dengan

berbagai kementerian terkait juga kepada pihak yang berkompeten dalam hal anggaran. Hal itu harus dilakukan agar tidak terjadi kerancuan dalam penyusunan anggaran.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Syamsul Mikar yang memimpin kunjungan tersebut mengungkapkan pihaknya mendapat banyak masukan berharga dari DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sehingga tujuan dari kunjungan tersebut dirasakan telah tercapai, tinggal menerapkannya di daerahnya.

"Kami merasa sangat terbantu dengan penjelasan dari DPRD provinsi, sesuai dengan tujuan dari kunjungan ini sehingga ini bisa kami terapkan dalam penyusunan atau melakukan pergeseran mata anggaran dalam APBD nantinya," kata Syamsul.



DPRD Sumbar Mulai Uji Kelayakan Calon Komisisioner KI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mulai melakukan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon anggota Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat masa bakti 2023-2027. Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and propert test*) tersebut dilaksanakan oleh Komisi I.

Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat Rafdinal menyebutkan proses *fit and propert test* calon anggota KI akan dilaksanakan selama dua hari (Kamis dan Jumat, 19 sampai 20 Januari 2023).

“Kami akan melaksanakan *fit and propert test* terhadap 15 nama yang

telah disampaikan oleh pemerintah provinsi berdasarkan hasil kerja tim seleksi kepada DPRD beberapa waktu lalu, tahapan ini akan berjalan sampai besok,” kata Rafdinal, Kamis (19/1/2023).

Melalui uji kelayakan dan kepatutan, lanjutnya, calon anggota KI tersebut akan menjalani serangkaian penilaian. Pihaknya akan menggali sejauh mana penguasaan dan pemahaman terhadap bidang tugas Komisi Informasi dan kemampuan umum masing-masing calon.

“Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan lima orang calon yang akan menjadi anggota definitif KI

periode mendatang serta calon pengganti berdasarkan peneringkatan dari nilai yang diperoleh oleh calon yang mengikuti *fit and propert test* tersebut,” paparnya.

Rafdinal menambahkan, hasil *fit and propert test* akan disampaikan kepada ketua DPRD. Selanjutnya, DPRD akan menyurati gubernur untuk mengeluarkan surat keputusan dan melantik anggota KI yang telah ditetapkan oleh DPRD. F

Khawatir Tergerus Globalisasi, DPRD Sumbar Bahas Ranperda PPKD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD). Pembahasan dilakukan dengan penyampaian nota penjelasan oleh Komisi V sebagai komisi penggagas setelah ditetapkan menjadi usul prakarsa peoduk hukum daerah dalam rapat paripurna 30 Januari 2023 lalu dan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar menjelaskan, Ranperda PPKD sebelumnya berjudul Ranperda tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat diinisiasi oleh Fraksi Gerindra dan diajukan melalui usul prakarsa Komisi V.

“Setelah dilakukan harmonisasi atau pembedaan konsepsi oleh Bapemperda DPRD maka ditetapkan menjadi usul prakarsa DPRD dengan judul Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam rapat paripurna akhir Januari lalu,” terang Irsyad mengawali rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Ranperda tersebut, Senin (6/2/2023).

Irsyad menegaskan, kebudayaan merupakan salah satu bidang yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kerangka perencanaan pembangunan. Baik pembangunan berskala nasional maupun dalam praktik kehidupan sehari-hari.

“Kebudayaan melekat dalam setiap individu dan kelompok bangsa yang merupakan ekspresi dari kompleksitas kehidupan,” ujarnya.

Lebih jauh menurut Irsyad Syafar, kebudayaan dalam salah satu pengertiannya adalah segala jenis hasil pemikiran, praktik sehari-hari, gagasan, yang dihasilkan dari proses belajar. Proses tersebut dapat dijelaskan sebagai praktik baik dari pengalaman hidup manusia atau kelompok masyarakat yang kemudian dipelihara, diwariskan, dan disimpan



dalam berbagai bentuk. Wujudnya dapat berupa benda yang tampak atau tangible ataupun yang tidak tampak atau intangible.

Dalam konteks Sumatera Barat, lanjutnya, kebudayaan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Mulai dari warisan budaya yang dihasilkan beriringan dengan sejarah, pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan, ekspresi seni, hingga berbagai karya kontemporer.

“Seluruh bentuk dan nilai yang ada dalam kebudayaan tersebut perlu dijaga dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup,” tegasnya.

Muhayatul, Tim Penggagas dari Komisi V DPRD dalam rapat paripurna tersebut menyampaikan, Sumatera Barat sebagai sebuah provinsi sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2022 memiliki karakteristik adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, sesuai dengan aturan Adat Salingka Nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat atau nagari, ritual, upacara adat, situs budaya dan kearifan lokal.

“Nilai tersebut menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat dan dari ketentuan itu dapat dilihat Sumatera Barat dapat dikatakan identik dengan dua hal yaitu Minangkabau dan Islam,” paparnya.

Lebih jauh Muhayatul

menerangkan, dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebagai mana tertuang dalam naskah akademik Ranperda PPKD, disebutkan bahwa garis besar permasalahan kebudayaan di Sumatera Barat adalah tergerusnya eksistensi kebudayaan di tengah masyarakat akibat pengaruh globalisasi.

Menurutnya, PPKD melihat salah satu kesulitan disebabkan belum adanya regulasi khusus mengenai kebudayaan di Sumatera Barat. Namun dalam dokumen yang sama belum nampak arah yang jelas terkait upaya mengatasi hal tersebut, demikian juga di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

“Hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan sehingga diajukannya usul prakarsa Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah,” ungkapnya.

Setelah penyampaian Nota Penjelasan terhadap Ranperda PPKD, DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta pemerintah daerah untuk memberikan tanggapan. Dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Wakil Gubernur, Audy Jolinaldy itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar meminta agar kepala daerah memberikan tanggapan dalam rapat paripurna berikutnya. P

Supardi Ingatkan PSM Jangan Terkontaminasi Kepentingan Politik



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi mengingatkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) tetap bekerja secara independen dan profesional dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. PSM diminta untuk tidak terkontaminasi oleh kepentingan politik salah satu kelompok atau golongan tertentu.

Hal itu diingatkan Supardi dalam sambutannya membuka Bimbingan Teknis Dasar PSM Kota Payakumbuh Angkatan Pertama, Selasa (14/2/2023). Dia mendorong agar PSM memberikan kontribusi lebih besar lagi dalam menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat terutama saat memasuki tahun politik 2024.

"PSM kami harapkan untuk tetap bekerja secara profesional dan independen, ikut berkontribusi dalam menjaga suasana kondusif dalam tahun politik ini," kata Supardi.

Dia memaparkan, PSM harus berkontribusi dalam menciptakan

suasana yang kondusif dari aspek keamanan hingga kesehatan, PSM harus bekerja dengan jiwa sosial yang tinggi dan tanpa pamrih. Jadi ketika telah menyatakan diri sebagai PSM, maka jiwa dan raga diwakafkan untuk kepentingan masyarakat.

"Jangan berpikir untuk hitung-hitungan materi, tugas pengabdian masyarakat adalah utama," ulasnya.

Dia menambahkan, karena tahun 2023 merupakan gerbang pencaturan politik maka diingatkan para PSM jangan terpengaruh dengan kondisi itu, seharusnya menjauhi diri karena akan berdampak buruk terhadap kinerja.

Seperti diketahui yang menjadi perhatian pemerintah pusat hingga daerah adalah, tingginya angka gizi buruk terhadap anak (Stunting-red). PSM harus menjadi garda terdepan untuk menjawab persoalan tersebut. Bagaimana agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pangan pokok dengan standar gizi yang sesuai untuk tumbuh kembang anak-anak mereka. Supardi mengungkapkan, Sumbar menjadi salah satu provinsi

dengan angka stunting yang masih tinggi, dan Kota Payakumbuh sendiri berada di peringkat ketujuh di Sumbar yang tentunya harus menjadi perhatian bersama.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumbar Arry Yuswandi mengatakan, Bimtek dasar PSM tersebut menjadi bekal pelaksanaan tugas pekerja sosial sebagai perwujudan dari peran serta masyarakat. Oleh sebab itu pemberdayaan PSM sangat penting diperjuangkan agar mampu mengelola urusan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"PSM menjadi mitra kerja pemerintah sebagai wujud peran serta masyarakat di dalam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. PSM harus mampu melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana atau pendamping dalam rangka menciptakan kesejahteraan sosial," ujarnya. F



Muzli M Nur Alokasikan Pokir Bangun Masjid dan Peralatan Belajar SMKN 1 Lubuk Sikaping

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muzli M Nur mengalokasikan pokok-pokok pikiran (pokir) untuk menunjang proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Sejumlah bantuan yang diberikan mulai dari pembangunan masjid, aula hingga peralatan belajar.

"Untuk menunjang proses belajar mengajar di SMKN 1 Lubuk Sikaping ini, saya mengalokasikan pokir tahun 2021 dengan nilai total Rp1 miliar antara lain untuk membangun masjid, aula juga untuk pembelian beberapa item perangkat pembelajaran," kata anggota Fraksi PAN DPRD Sumbar yang berasal dari daerah pemilihan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat tersebut saat mengunjungi SMKN 1 Lubuk Sikaping, Senin (16/1/2023).

Kunjungan tersebut, menurut Muzli, adalah dalam rangka meninjau realisasi pembangunan masjid dan aula sekolah tersebut. Menurutnya, ia merasa terpanggil untuk mengalokasikan pokir karena pernah menjadi bagian dari komite sekolah tersebut beberapa tahun lalu. Selain itu, selama dua tahun terakhir, SMKN 1 Lubuk Sikaping selalu menjadi sekolah kejuruan terbaik di Kabupaten Pasaman.

Dia menjelaskan, pembangunan mesjid dan aula SMKN 1 Lubuk Sikaping sempat terhenti pada tahun 2022. Hal itu dikarenakan perhitungan pihak ketiga yang mengerjakan belum sesuai, pada 2023 pembangunan fisik bangunan dilanjutkan.

Dalam kunjungan itu Muzli menambah sebanyak 14 unit komputer untuk labor komputer dan empat unit mesin jahit untuk jurusan

tata busana. Dia menerangkan, akan menambah lagi peralatan jurusan tata busana sekolah tersebut sehingga menjadi lebih lengkap dan sesuai dengan perkembangan zaman.

"Dengan peralatan yang lengkap itu siswa yang dididik di SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping diharapkan bisa menjadi tenaga terampil di masa depan," katanya.

Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat itu berharap apa yang direalisasikan kepada SMK Negeri 1 Lubuk Sikaping bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga bisa mengurangi beban pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Apa yang diberikan harus dijaga sebagai aset sekolah. F



Masyarakat Adat Pessel Dukung Lahirnya Perda Tanah Ulayat

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan muatan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat, termasuk dengan mengunjungi beberapa kabupaten dan kota untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan. Pada Jumat (13/1), komisi yang membidangi pemerintahan tersebut, mengunjungi Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendapatkan masukan terhadap pembahasan Ranperda itu. Dalam pertemuan di kantor bupati setempat, masyarakat adat daerah itu menyambut positif Ranperda Tanah Ulayat Provinsi Sumatera Barat.

Sekretaris Komisi I, Rafdinal mengatakan dalam pertemuan tersebut masyarakat adat di Kabupaten Pesisir Selatan berharap ranperda itu bisa diterapkan dengan

baik setelah disahkan menjadi produk hukum atau peraturan daerah (perda) nantinya. Sejumlah tokoh adat juga menilai Perda Tanah Ulayat yang lama, yakni Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang.

"Ranperda tanah ulayat baru yang sedang dibahas Komisi I DPRD Sumbar ini sangat dinantikan oleh masyarakat adat termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan," katanya.

Rafdinal menegaskan setelah Ranperda Tanah Ulayat ditetapkan menjadi Perda, diharapkan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan bisa menindaklanjuti dengan membuat Perda turunan. Menurutnya, banyak tanah ulayat yang dimanfaatkan untuk lahan perkebunan. Namun sering ditemukan, proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) dengan perusahaan tidak melibatkan ninik

mamak ataupun KAN. Bahkan ada salah satu HGU telah diperpanjang hingga 2080.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat juga menampung aspirasi masyarakat terkait tanah ulayat yang berdekatan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Masyarakat adat berharap statusnya bisa diperjelas.

Sementara itu anggota Tim Pembahas Ranperda Tanah Ulayat, Sawal mengatakan, unsur LKAM serta perangkat nagari di Kabupaten Pesisir Selatan sangat mendukung Ranperda Tanah Ulayat segera disahkan.

"Masukan dan saran serta harapan yang disampaikan dalam pertemuan itu sangat strategis untuk menyempurnakan muatan Ranperda yang sedang dibahas ini," tukuknya. T



Alokasikan Pokir Untuk Workshop Supardi Berupaya Tingkatkan Literasi Konten Kreator

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi mendorong generasi muda untuk meningkatkan literasi dalam kreasi konten digital. Seiring perkembangan teknologi, konten kreator menjadi potensi yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi di masa datang.

Mewujudkan upaya tersebut, politisi Partai Gerindra asal Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota itu mengalokasikan pokok-pokok pikirannya untuk workshop “Young Entrepreneur in Digital Age”. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat itu digelar di Kota Payakumbuh, Rabu (1/3). Kegiatan diikuti oleh sekitar 100 orang anak muda yang berminat di bidang konten kreator.

“Workshop ini bertujuan untuk

mendorong literasi anak muda yang potensial dalam pengembangan kreasi konten sehingga semakin mampu mengeksplorasi kreativitas anak muda di era digital saat ini,” kata Supardi.

Dia menegaskan, perkembangan teknologi terus bergerak maju dengan sangat pesat. Masyarakat harus mampu memanfaatkan perkembangan tersebut sebagai peluang menggerakkan ekonomi kreatif dan pemerintah harus hadir untuk mendorong literasi generasi muda sebagai pengguna teknologi paling besar.

“Media digital sudah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan, sehingga generasi muda khususnya harus bisa memanfaatkan hal ini sebagai sebuah peluang dan pemerintah harus hadir untuk mendorong hal ini,” lanjut Supardi.

Dia menjelaskan, workshop akan

dilaksanakan dua gelombang yaitu gelombang pertama pada tanggal 1 sampai 4 Maret dan gelombang kedua pada tanggal 6 sampai 9 Maret 2023. Dia melihat perkembangan kreasi konten dari Kota Payakumbuh khususnya sangat besar. Namun, para konten kreator tersebut harus dipacu kemampuannya melalui program peningkatan kualitas sehingga kreasi digital yang dihasilkan semakin baik.

Melalui workshop tersebut, lanjut Supardi, juga akan menjadi wadah saling berbagi pengalaman antar konten kreator dalam meningkatkan teknik dan kemampuan dalam memproduksi konten digital. Sedangkan, pelatihan yang diberikan di dalam workshop antara lain narasi, naskah, editing konten, pengelolaan media sosial, fotografi, dan lainnya. P

Aida Perjuangkan Rp8 Miliar untuk Pariwisata Lembah Harau



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) daerah pemilihan Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh, Aida, berhasil memperjuangkan anggaran untuk pengembangan objek wisata Lembah Harau. Sekitar Rp8 miliar anggaran provinsi akan dialokasikan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk perbaikan sarana prasarana objek wisata tersebut tahun 2023 ini.

“Alhamdulillah, melalui perjuangan meyakinkan pemerintah provinsi anggaran untuk perbaikan

sarana prasarana objek wisata Lembah Harau bisa direalisasikan melalui BKK kepada Pemkab Limapuluh Kota,” kata Aida.

Politisi Partai Demokrat yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumbar itu berharap Pemkab Limapuluh Kota bisa mengajak masyarakat berperan menciptakan lokasi wisata yang ramah terhadap pengunjung. Sehingga tercipta kenyamanan di setiap lokasi wisata dan pada akhirnya akan mendongkrak minat wisatawan untuk datang ke Kabupaten Limapuluh Kota yang tentunya akan memberikan dampak

kepada perekonomian masyarakat.

Ia menegaskan, pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan serius mengingat ke depan pariwisata akan menjadi unggulan dalam peningkatan ekonomi Sumatera Barat. Pelayanan harus ditingkatkan, harus menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan.

“Kita harus mempersiapkan seluruh sarana prasarana serta sumber daya manusia sebagai tuan rumah, agar memberi kesan yang baik sehingga menarik minat kunjungan wisata,” ujarnya. L

Penyusunan Kode Etik DPRD Sumbar

Muzli M Nur: Kode Etik Menjaga Marwah Lembaga



Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Muzli M Nur menegaskan, kode etik merupakan aturan untuk menjaga marwah suatu lembaga. Kode etik mengatur tata cara atau norma berperilaku dan etika yang harus dijaga oleh anggota dari lembaga tersebut, demikian juga lembaga DPRD.

Hal itu ditegaskan Muzli terkait penyusunan kode etik baru yang saat ini tengah dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk mengganti kode etik lama yang ditetapkan pada tahun 2011 yang sudah tidak relevan lagi dengan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Muzli, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi utama yaitu di bidang anggaran, pengawasan dan pembentukan peraturan daerah. Selain itu, DPRD juga memiliki tugas konstitusional lainnya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

"Untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, ada tiga instrumen sebagai dasar dan acuan bagi DPRD yaitu tata tertib, kode etik dan tata cara

beracara," katanya, Rabu (11/1/2023).

Dia menjelaskan, tata tertib merupakan pedoman umum bagi anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan kode etik merupakan norma, tata perilaku dan etika yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota dewan dalam menjalankan tupoksi dan kewenangan tersebut. Sedangkan tata beracara merupakan alat bagi Badan Kehormatan untuk mengawal dan menegakkan aturan terkait pelaksanaan tata tertib dan kode etik oleh seluruh anggota dewan.

"Jadi, kode etik memiliki fungsi sangat penting karena tidak saja berkaitan dengan penegakan aturan mengenai norma, perilaku dan etika saja tetapi adalah sebagai pengawal harkat, martabat dan kredibilitas lembaga DPRD baik sebagai lembaga pemerintahan daerah maupun sebagai representasi masyarakat," tegasnya.

Muzli menambahkan, kode etik DPRD Provinsi Sumatera Barat yang lama ditetapkan pada tahun 2011, tidak berlaku lagi karena peraturan pemerintah yang menaunginya sudah dicabut. Selain itu, kode etik yang

lama tersebut juga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

Dia memaparkan, sesuai pasal 1 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, rancangan kode etik secara formal harus berisi tentang 12 hal. Yakni tentang ketaatan dalam melaksanakan sumpah dan janji, sikap dan perilaku anggota DPRD, tata kerja DPRD, tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah, tata hubungan antara anggota DPRD, tata hubungan antar anggota DPRD dan pihak lain, tata cara penyampaian pendapat tanggapan sanggahan, kewajiban sebagai anggota DPRD, larangan sebagai anggota DPRD, hal-hal yang tak boleh dilakukan oleh anggota DPRD, sanksi dan mekanismenya serta rehabilitasi.

"Selain itu yang tak kalah penting adalah bahwa kode etik juga harus memuat perilaku dan norma kearifan lokal masyarakat Sumatera Barat yang berlandaskan kepada filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah," tutupnya. T

Ranperda PPKD

Wagub Sumbar Sarankan Muatan Terkait Dewan Kebudayaan Daerah Dihapus



Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menyarankan agar substansi atau materi muatan mengenai Dewan Kebudayaan Daerah di dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (PPKD) untuk dihapus. Hal itu didasari karena tidak ada kewenangan dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait hal tersebut.



Ilustrasi panghulu tempo dulu. (Foto KITLV)

Audy Joinaldy menyampaikan saran itu dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (7/2/2023). Rapat paripurna beragendakan mendengarkan tanggapan pemerintah daerah terhadap Ranperda PPKD yang menjadi usul prakarsa DPRD.

“Substansi atau materi muatan mengenai Dewan Kebudayaan Daerah disarankan untuk dihapus karena tidak ada kewenangan dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Audy.

Selain itu, Audy juga menyarankan agar perangkat daerah terkait yang akan melaksanakan Ranperda harus dicantumkan dengan jelas sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi karena terkait pemajuan kebudayaan juga terkait dengan perangkat daerah yang lain.

Dalam rapat paripurna tersebut, Audy menyampaikan beberapa saran pemerintah terkait substansi dan teknis penyusunan Ranperda PPKD. Mengenai teknis penyusunan naskah akademis dan Ranperda PPKD, dia menyarankan agar penyusunan naskah akademik disesuaikan dengan lampiran I UU nomor 12 tahun 2011 sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 13 tahun 2022.

“Penyusunan naskah akademik harus dilakukan melalui kajian secara mendalam, serta berkoordinasi dengan kabupaten/kota dan perangkat daerah terkait,” katanya.

Saran-saran juga disampaikan

terkait judul, dasar hukum, istilah, pengertian, batasan pengertian, singkatan, pasal-pasal serta sistematika Ranperda. Judul Ranperda disarankan untuk diganti menjadi “Pemajuan Kebudayaan” sementara dasar hukum disarankan untuk disempurnakan dengan memedomani ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Audy menyarankan terkait tugas dan wewenang, pokok pikiran kebudayaan daerah, perlindungan kebudayaan, pengembangan, pemanfaatan, peran serta masyarakat dan pembinaan, pengawasan serta pelaporan. Teknik penyusunan substansi Ranperda dalam bentuk pasal, ayat dan tabulasi agar memedomani ketentuan sesuai UU nomor 12 tahun 2011.

“Selanjutnya selain teknis penyusunan, tentunya mekanisme pembentukan Perda juga harus disesuaikan dengan UU nomor 12 tahun 2011 sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 13 tahun 2022. Berdasarkan pasal 58 UU nomor 13 tersebut, selain Ranperda yang diprakarsai oleh pemerintah daerah, Ranperda yang berasal dari DPRD juga dilakukan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM,” kata Audy.

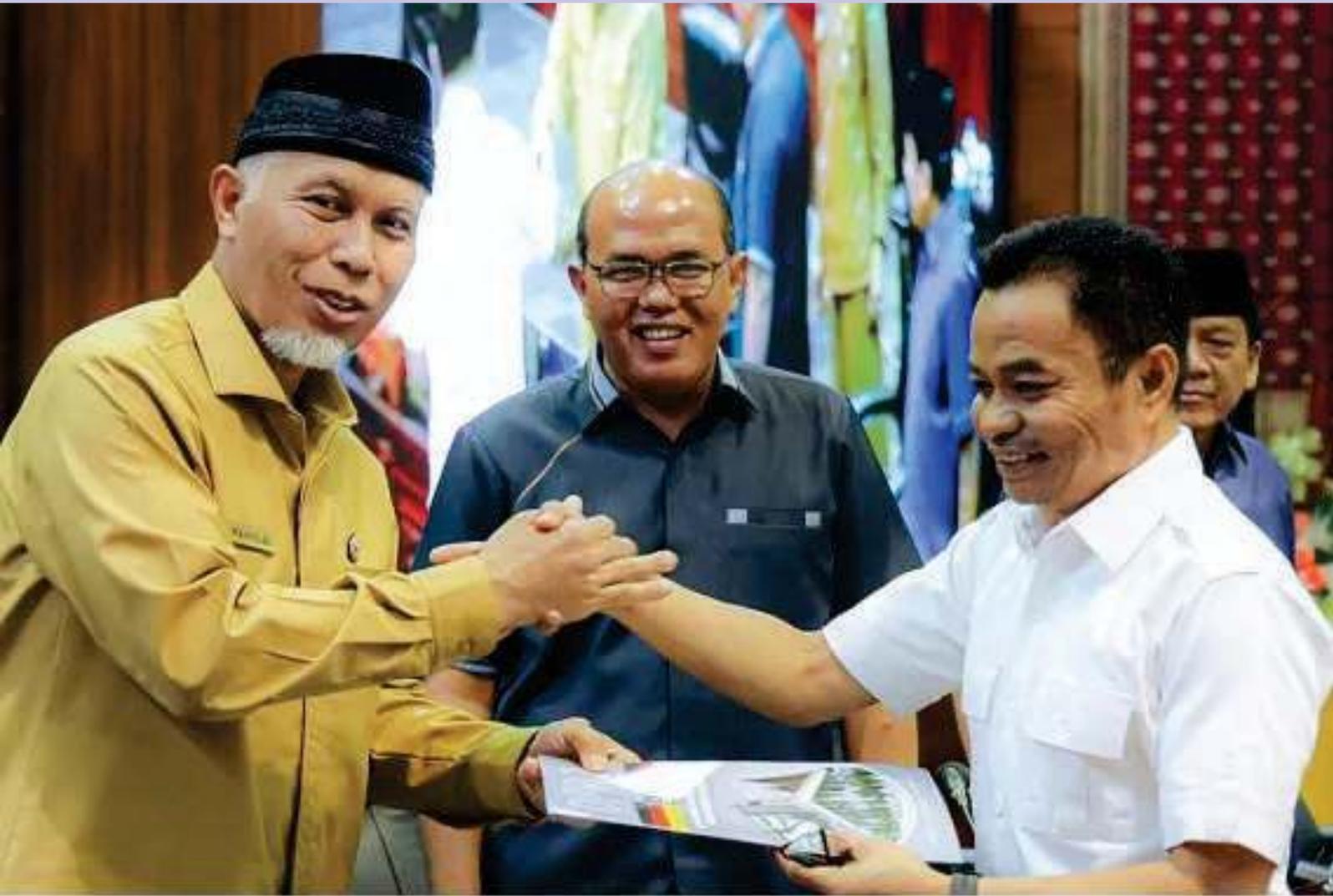
Audy berharap, tanggapan dan saran dari pemerintah daerah dapat menjadi bahan masukan dalam pembahasan Ranperda tersebut. Dia

menekankan, bahwa perlu dipahami bersama, tanggapan yang disampaikan hendaknya dapat dilihat sebagai sebuah keinginan untuk saling mengisi dan melengkapi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar memimpin rapat paripurna tersebut mengakui, dalam nota penjelasan telah dijelaskan panjang lebar terkait latar belakang, landasan filosofis, yuridis, sosiologis serta substansi dan materi yang terkandung di dalam Ranperda. Namun tentu masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan bersama-sama agar Ranperda dapat lebih akomodatif dan lebih sempurna untuk mengatur tentang pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah.

“Oleh sebab itu perlu masukan dari pemerintah Daerah dan semua pihak yang terkait dengan substansi yang terkandung dalam Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah ini,” kata Irsyad.

Menurut Irsyad, dari tanggapan yang disampaikan, secara prinsip pemerintah daerah mendukung dan mengapresiasi Ranperda Prakarsa DPRD yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap upaya-upaya untuk mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, saran dan masukan akan sangat membantu untuk kesempurnaan substansi dan muatan Ranperda agar dapat menjadi regulasi yang betul-betul dapat dipedomani dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait.



DPRD: Dewan Kebudayaan Berbentuk Lembaga Sebagai Instrumen Pemajuan Kebudayaan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat berpendapat Dewan Kebudayaan daerah merupakan bentuk lembaga sebagai salah satu instrumen pemajuan kebudayaan. Hal itu didasari kepada UU nomor 5 tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah nomor 87 tahun 2021.

Tim Pembahas Ranperda PPKD DPRD Provinsi Sumatera Barat Hidayat menegaskan hal itu dalam rapat paripurna, Senin (13/2/2023). Rapat paripurna tersebut beragendakan menyampaikan nota jawaban DPRD terhadap tanggapan pemerintah terkait Ranperda PPKD yang merupakan produk hukum daerah inisiatif DPRD.

“Terkait saran agar substansi/ materi muatan mengenai “Dewan Kebudayaan Daerah” dihapus, karena tidak ada kewenangan dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka menurut kami “Dewan Kebudayaan Daerah” merupakan bentuk lembaga kebudayaan sebagai salah satu instrumen pemajuan kebudayaan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2021 disebutkan bahwa lembaga kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kebudayaan. Karena itu, dipandang penting untuk membentuk lembaga kebudayaan di daerah.” kata Hidayat.

Dia menambahkan, saran mengenai penghapusan substansi/materi muatan Dewan Kebudayaan Daerah dapat diterima. Akan tetap perlu untuk mengatur tentang pembentukan lembaga kebudayaan di daerah.

Lebih lanjut, Hidayat menyampaikan saran dan tanggapan pemerintah terhadap Ranperda PPKD akan menjadi masukan dalam pembahasan selanjutnya sebagai bentuk penyempurnaan terhadap produk hukum daerah. UU nomor 5 tahun 2017 dan PP nomor 87 tahun 2021 mengenai pemajuan kebudayaan menjadi landasan kuat bagi Ranperda PPKD yang diharapkan implementatif dalam memajukan kebudayaan di Sumatera Barat.

“Mengenai penyusunan naskah akademik jika ada yang belum sesuai akan disesuaikan kembali di dalam pembahasan selanjutnya, naskah akademik telah melalui kajian mendalam serta akan terus dilakukan penguatan materi bersamaan dengan pembahasan,” ujarnya.

Hidayat juga menyampaikan akan mempertimbangkan saran pemerintah untuk mengganti judul Ranperda dalam pembahasan lebih lanjut. Demikian juga dengan dasar-dasar hukum, pencantuman istilah, pengertian, batasan pengertian atau singkatan yang digunakan secara berulang juga akan disesuaikan dan lebih disempurnakan setelah finalisasi pembahasan.

Sedangkan, terkait perangkat daerah yang akan melaksanakan

Ranperda PPKD menurut Hidayat adalah Dinas Kebudayaan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya. Saran mengenai penghapusan pengaturan cagar budaya perlu dipertimbangkan kembali karena cagar budaya merupakan salah satu bagian yang penting untuk diperhatikan karena merupakan warisan budaya dan sudah diatur dalam UU nomor 11 tahun 2010.

“Saran agar Ranperda disempurnakan dengan menambahkan penjelasan pasal per pasal akan ditambahkan, dalam pembahasan lebih lanjut akan dicermati kembali agar penyusunan substansi disesuaikan dengan memedomani aturan-aturan yang disebutkan dalam saran,” alam rapat paripurna yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi tersebut.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi memimpin rapat paripurna itu menyampaikan, catatan dan masukan yang diberikan oleh gubernur terhadap Ranperda PPKD merupakan wujud dukungan dalam kaedah saling mengisi dan saling melengkapi.

“Dalam rapat paripurna sebelumnya, Gubernur memberikan apresiasi terhadap pengajuan Ranperda usul prakarsa DPRD tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah. Seperti penyesuaian naskah akademik, penyempurnaan dan penghapusan beberapa materi serta penyempurnaan terhadap legal drafting tersebut yang merupakan wujud dari dukungan dalam kaedah saling mengisi dan saling melengkapi,” ujarnya.

Dia berharap, penjelasan dari DPRD dalam rapat paripurna itu sudah dapat mengakomodir apa yang disarankan pemerintah. Namun jika masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka dapat ditindaklanjuti dalam proses pembahasan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan di tingkat komisi, di mana tim pembahas adalah Komisi V. Tim Pembahas diketuai oleh Hidayat, Wakil Ketua Gustami Hidayat dan Sekretaris Muhayatul. P



Launching Program Sumbarku Bersinar Suwirpen: Mari Bersama-sama Perangi Narkoba

Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib mengajak seluruh lembaga, generasi muda dan masyarakat luas untuk tak henti memerangi dan menjauhi narkoba. Hal ini dikarenakan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih mengkhawatirkan, bahkan Presiden Joko Widodo sempat menetapkan status Indonesia darurat narkoba pada Tahun 2015 lalu.

Hal tersebut disampaikan Suwirpen saat menghadiri acara launching program 'Sumbarku Bersinar' (Sumatera Baratkku Bersih Narkoba) yang diinisiasi oleh Lembaga Anti Narkoba (LAN) Sumatera Barat, Sabtu siang (04/2) di Aula Gubernur Sumbar.

Pada kesempatan itu Suwirpen Suib mengatakan DPRD memberikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada Ketua LAN Sumbar yang telah menginisiasi program 'Sumbar Ku Bersinar'.

"Program-program seperti ini akan menurunkan jumlah korban penyalahgunaan narkoba di Sumbar," ujar Suwirpen.

Menurut Suwirpen, peredaran narkoba semakin memprihatinkan karena jumlahnya sangat banyak dan berasal dari produksi luar negeri bahkan dalam negeri.

"Pihak yang berwenang belum berhasil menangkal secara tuntas peredaran tersebut karena pasar gelap peredaran narkoba terus menjamur. Sebagiannya dapat diungkap oleh pihak berwenang,

namun sebetulnya masih banyak yang belum terungkap," ujarnya.

Mangsa yang selalu menjadi sasaran utama peredaran narkoba, tambahnya, adalah para generasi muda, para pelajar dan mahasiswa.

"Bung Karno pernah mengatakan : jika ingin mengancurkan suatu bangsa, hancurkanlah generasi mudanya. Kita tentu tidak ingin bangsa ini hancur," katanya.

Oleh karena itu Suwirpen menilai masyarakat juga perlu melakukan antisipasi dan pencegahan serta membentengi diri dari sisi pengguna atau pemakaian narkoba. Kelompok masyarakat yang potensial menggunakan narkoba menurutnya adalah generasi muda, pelajar dan mahasiswa. Kelompok ini selalu menjadi incaran bagi pengedar dan bandar narkoba.

Program 'Sumbarku Bersinar' yang salah satunya kegiatannya berupa penyuluhan dinilai Suwirpen bermanfaat untuk memperluas sosialisasi menjauhi narkoba. Generasi muda yang menjadi peserta penyuluhan dapat menjadi perantara dalam rangka menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat lainnya.

"Mari bersama-sama terus lakukan gerakan anti narkoba," katanya.

Suwirpen berharap, LAN Sumbar terus memperluas jangkauan sasaran kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi. Selain itu perlu juga menjalin kerjasama dan koordinasi

yang baik dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar dalam menentukan sasaran penyuluhan dan sosialisasi.

"BNNP tentu mempunyai data potensi kelompok masyarakat yang rentan terlibat dengan penggunaan narkoba. Hendaknya LAN memprioritaskan kelompok masyarakat yang berpotensi sangat rentan tersebut," ujarnya lagi.

Suwirpen menilai sebagai lembaga yang baru dibentuk, LAN hendaknya selalu mencari dan berinovasi dalam melakukan langkah-langkah dan cara yang tepat dan cepat untuk menangkal agar generasi muda kita tidak terjerumus kedalam bahaya narkoba.

Dalam acara itu Suwirpen Suib juga berkesempatan menyerahkan piagam penghargaan kepada 13 Tokoh Peduli Anti Narkoba (Topan) Tahun 2023 oleh LAN Sumbar diantaranya, Anggota DPD RI Alirman Sori, Dirut PT Andalan Mitra Prestasi Tafyani Kasim, Anggota DPR RI Muhammad Iqbal, Dirut PT. IKARSA Muhammad Zuhrizul, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumbar DR. Riki Saputra, Anggota DPRD Sumbar Artati, Anggota DPRD Sumbar Nela Abdika Zamri, Sekda Kota Padang Andre Algamar, Kepala BPBD Padang Endrizal, Ketua DPD LPM Padang Irwan Basir Dt Rajo Alam, Kepala Kemenag Kota Padang Edy Oktafiandi, Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Padang H. Afrizen dan M. Zulkanaidi pensuian ASN Pemprov Sumbar.(TT)



Perda Dilahirkan, DPRD Sumbar Berharap Ekonomi Kreatif Semakin Menggeliat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat berharap sektor ekonomi kreatif bisa bergerak lebih maju lagi setelah lahirnya peraturan daerah (Perda). Produk hukum daerah tentang ekonomi kreatif yang telah ditetapkan bertujuan untuk mendorong perekonomian masyarakat.

Harapan itu disampaikan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Supardi, memimpin rapat paripurna penetapan Ranperda tentang Ekonomi Kreatif menjadi Perda, Rabu 28/2/2023).

“Ekonomi kreatif merupakan salah satu subsektor yang mampu menopang perekonomian untuk terus bertumbuh, dengan adanya regulasi tentu akan semakin memperkuat posisinya dalam mendorong perekonomian masyarakat,” kata Supardi.

Menurut Supardi pengaruh subsektor ekonomi kreatif dalam menopang pertumbuhan ekonomi sangat besar. Untuk itu harus dilakukan pengelolaan secara sistematis, termasuk menyediakan produk hukum sebagai penopang keberadaannya.

“Ekonomi kreatif meliputi bermacam usaha yang berkembang

di tengah masyarakat, untuk memperkuat keberadaannya untuk memiliki daya saing harus dikelola secara maksimal dan dilindungi payung hukum,” ujarnya.

Dia menambahkan, Sumatera Barat memiliki berbagai macam potensi ekonomi kreatif. Keanekaragaman seni dan budaya merupakan potensi yang besar untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai modal ekonomi kreatif.

“Pemanfaatan potensi tersebut akan berkontribusi besar dalam memajukan perekonomian,” ujarnya.

Dia memaparkan, selama ini pengembangan ekonomi kreatif menemui banyak kendala. Hadirnya regulasi melalui peraturan daerah diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut sehingga semakin leluasa bergerak. Keterbatasan akses, kurangnya perencanaan, permodalan, keterbatasan promosi termasuk juga kapasitas pelaku usaha menjadi hambatan yang menyebabkan ekonomi kreatif sulit berkembang.

“Hadirnya produk hukum daerah diharapkan mampu mengatasi kendala tersebut, kehadiran pemerintah memiliki payung hukum dalam melakukan pembinaan pelaku usaha, pengembangan melalui

permodalan serta inovasi dan fasilitasi pemasaran dan lainnya,” paparnya.

“Dengan adanya peraturan daerah, peran pemerintah dalam membantu perencanaan, pelaksanaan hingga pemasaran akan lebih terarah, terstruktur dan sistematis,” tukuknya.

Lebih jauh, Supardi mengungkapkan, Perda tentang Ekonomi Kreatif diharapkan mampu menjadi regulasi yang komprehensif mengoptimalkan peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif di Sumatera Barat. Meski demikian, peran tersebut tidak mengenyampingkan prinsip kemandirian pelaku usaha sehingga memiliki daya saing, andal dan berkelanjutan.

“Kami berharap, dengan lahirnya Perda ini akan mampu mendorong subsektor ekonomi kreatif bergerak lebih cepat lagi sehingga mampu bertumbuh, berkembang dan maju yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga tujuan pembangunan di bidang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara nyata,” tandasnya. F



Masuk Lima Besar, Sekretariat DPRD Sumbar Bertekad Terus Tingkatkan Inovasi



Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), masuk lima besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terinovatif pada ajang Anugerah Inovasi Daerah dan Pelayanan Prima Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, akhir tahun 2022 lalu. Keberhasilan itu karena memiliki belasan inovasi untuk menunjang kinerja kedewanan dan mendukung penerapan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

Sekretaris DPRD Sumbar Rafli mengatakan, penilaian dilakukan oleh 12 tim independen diantaranya dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Universitas Gadjah Mada, Kompas dan CNN.

"Meskipun dengan jadwal tugas yang padat untuk menunjang kinerja kedewanan, namun kami terus

berupaya berinovasi menunjang kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Rafli.

Dia menjelaskannya inovasi yang diterapkan Sekretariat DPRD Sumbar sepanjang 2022 antara lain Kios layanan JDIIH, E-Kliping, Majalah Mimbar, TV Agenda, Kios Layanan PPIID, E-pustaka, Pojok Baca Digital (POCADI) dan Protokol Kesehatan. Selain itu juga berinovasi untuk melaksanakan rapat-rapat dewan terutama rapat paripurna secara virtual, Repository Produk Hukum, Klinik Pratama PMI Sumbar dan Video Wall yang masih dalam tahap inisiasi.

"Sekretariat DPRD Sumbar mendapatkan nilai 1.074 dari berbagai inovasi yang telah dirancang dan dilaksanakan tersebut," katanya.

Menurutnya, penghargaan yang diraih Sekretariat DPRD Sumbar pada Anugerah Inovasi Daerah dan Pelayanan Prima Inovasi Pelayanan Publik tersebut menjadi motivasi

untuk terus melakukan inovasi. Dia bertekad akan terus memacu kinerja untuk melahirkan banyak inovasi lainnya sehingga pada tahun 2023 nanti bisa naik ke peringkat tiga besar.

"Peningkatan kinerja ini sudah menjadi komitmen kami di sekretariat DPRD Sumbar, bagaimana di tahun 2023 bisa melahirkan banyak inovasi lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Tahun 2023 Pemerintah provinsi Sumatera Barat menetapkan lima OPD terinovatif, pertama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan 23 inovasi, RSUD M. Natsir Solok sebanyak 22 inovasi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sumbar dengan 20 inovasi, Dinas Komunikasi Informasi Data Statistik (Diskominfotik) dengan 15 inovasi serta terakhir Sekretariat DPRD Sumbar dengan 12 inovasi. F



Pertemuan Awal Tahun dengan Wartawan Supardi Paparkan Sejumlah Permasalahan Terkait Percepatan Pembangunan Sumbar

Memasuki tahun 2023, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi mengadakan temu ramah dengan wartawan, Minggu (8/1/2023) malam. Selain untuk bersilaturahmi, pertemuan itu juga dimanfaatkan untuk memaparkan sejumlah permasalahan dan tantangan ke depan serta solusi yang harus diambil agar permasalahan tersebut tidak menjadi kendala dalam percepatan pembangunan daerah.

Menurut Supardi, sama seperti daerah lain dan nasional, Sumatera Barat menghadapi tantangan cukup berat setelah dihadang pandemi Covid-19. Selain itu, kondisi ekonomi

global yang tentunya akan berdampak kepada perekonomian nasional dan daerah juga harus diwaspadai dengan mempersiapkan langkah-langkah antisipasi.

"Tantangan ini cukup berat karena kita baru saja lepas dari wabah pandemi yang telah berpengaruh besar terhadap perekonomian, harus disikapi dengan langkah-langkah antisipasi untuk meminimalisir dampaknya terhadap percepatan pembangunan," ungkap Supardi.

Dalam kesempatan itu, Supardi memaparkan, tantangan perekonomian yang harus diwaspadai adalah inflasi. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus melakukan

upaya secara maksimal agar inflasi tetap terjaga, stabil dan terkendali. Ketersediaan bahan pangan pokok, menjaga bagaimana agar daya beli masyarakat tetap kuat sehingga indeks harga konsumen tidak menurun harus benar-benar diperhatikan secara serius.

"Inflasi Sumatera Barat masih tinggi dalam skala nasional, ini harus diwaspadai dan disikapi secara serius oleh para pemangku kepentingan terutama oleh TPID, bagaimana upaya menjaga ketersediaan bahan pangan pokok dan komoditi pembentuk inflasi lainnya untuk menjaga indeks harga konsumen berada pada kondisi yang rendah, stabil dan terkendali," bebernya.

Kemudian, lanjut Supardi, tantangan lainnya adalah pertumbuhan ekonomi dimana guncangan ekonomi global tidak bisa dipungkiri akan memengaruhi kondisi ekonomi nasional dan ekonomi daerah. Untuk itu, Supardi meminta pemerintah daerah mengambil langkah yang tepat agar dampak tersebut dapat diminimalisir.

Supardi berpendapat, sektor ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, perhatian terhadap perkembangan ekonomi kreatif dan UMKM harus dilakukan secara serius.

"Dari sisi ekonomi kreatif, Sumatera Barat memiliki potensi besar terutama di bidang seni dan budaya. Sementara UMKM sendiri juga telah membuktikan diri mampu bertahan di tengah krisis global, meskipun sempat terpuruk karena pandemi. Ini harus mendapat perhatian serius melalui program pembinaan dan pengembangan yang jelas dan terarah," tegasnya.

Lebih jauh menurut Supardi, gagasan menjadikan tahun 2023 sebagai tahun kunjungan wisata Sumatera Barat sudah sangat tepat. Potensi ekonomi baru daerah ada di pariwisata, yang akan menggeliatkan perekonomian di berbagai bidang termasuk ekonomi kreatif dan UMKM.

"Pariwisata akan berkaitan dengan banyak bidang kegiatan ekonomi mulai dari usaha perhotelan, jasa pelayanan,

makanan dan minuman hingga usaha kreatif dan UMKM lainnya, jadi langkah menggenjot pariwisata sudah tepat," lanjutnya.

Ditetapkannya tahun 2023 sebagai tahun kunjungan wisata dengan tagar "Visit Beautiful West Sumatera" menurut Supardi akan memberikan angin segar untuk pertumbuhan ekonomi. Sumatera Barat telah memiliki berbagai potensi wisata mulai dari wisata alam, wisata budaya hingga wisata sejarah dan lainnya.

"Jika pariwisata menggeliat, maka banyak aktivitas ekonomi akan terdongkrak dan bergerak maju. Untuk itu harus dipersiapkan secara matang baik infrastruktur maupun sumber daya manusia agar menjadi magnet yang akan menarik kunjungan ke Sumatera Barat," tegasnya.

Peningkatan Infrastruktur untuk akses masuk ke Sumatera Barat dan konektivitas antar daerah menurut Supardi menjadi salah satu penentu bagi keberhasilan program pengembangan pariwisata. Pintu masuk melalui akses transportasi udara, darat maupun laut harus selalu dalam kondisi baik.

Terkait akses transportasi udara, Supardi menegaskan akan memperjuangkan secara maksimal agar status Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM) tidak turun menjadi bandara regional. Jika turun status, maka akses wisatawan dari luar negeri tidak akan bisa langsung ke Padang.

"Perubahan status BIM akan berdampak kepada akses wisatawan, kita akan upayakan bagaimana perubahan itu tidak jadi dilakukan," ulasnya.

Kemudian, untuk akses transportasi darat, Supardi menegaskan percepatan pembangunan jalan tol Trans Sumatera adalah suatu keharusan. Dia menyayangkan tersendatnya pembangunan ruas tol Padang-Pekanbaru yang merupakan ruas dari Tol Trans Sumatera.

Dia mengingatkan bahwa pembangunan Tol Trans Sumatera merupakan program strategis Presiden RI dan gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat memiliki tanggung jawab agar program tersebut terlaksana. Persoalan yang mengganjal pembangunan jalan tol saat ini menurut Supardi adalah pembebasan lahan.

"Gubernur dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, harus bertanggung jawab untuk menuntaskannya agar proyek strategis tersebut bisa terlaksana," katanya.

Selain jalan tol, Supardi juga mengingatkan kepada gubernur untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/ kota dalam hal konektivitas antar daerah. Jalan penghubung antar daerah terutama yang berkaitan dengan pariwisata harus dalam kondisi baik. P



Perpisahan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat

Januari 2023



Supardi Sayangkan Sektor Pertanian Belum Mampu Mengangkat Pertumbuhan Ekonomi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi menyayangkan peran sektor pertanian yang terus menurun dalam menunjang pertumbuhan ekonomi makro daerah. Padahal menurutnya pertanian merupakan program unggulan dan alokasi anggaran untuk sektor tersebut sangat besar yaitu 10 persen dari total APBD provinsi.

Hal itu diungkapkan Supardi saat menghadiri penyampaian outlook perekonomian Sumatera Barat tahun 2023 sekaligus perpisahan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Wahyu Purnama A, Rabu (25/1/2023).

“Sangat disayangkan sektor pertanian sebagai program unggulan yang telah berjalan tiga tahun tersebut belum bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi Sumbar,” katanya.

Supardi mengungkapkan, merujuk kepada rangkuman kegiatan ekonomi pemerintah daerah tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tahun ini

diperkirakan meningkat dibanding tahun lalu. Meski demikian, Supardi menilai kenaikan yang diprediksi menyentuh angka 4,2 persen itu belum cukup bersaing dengan provinsi-provinsi lain. “Diukur dengan rata-rata nasional kita masih di bawah, idealnya harus melebihi rata-rata tersebut,” katanya.

Menurutnya, perlambatan pada sektor pertanian karena gagal panen atau faktor lainnya, mestinya dapat diminimalisir karena anggaran yang disediakan cukup besar sehingga dirasakan bisa mengatasi persoalan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Supardi menyampaikan apresiasi kepada Wahyu Purnama A karena selama lebih kurang tiga tahun memimpin kantor perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat telah melahirkan banyak inovasi yang sangat membantu pemerintah daerah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Salah satu inovasi strategis yang digagasnya adalah pencanangan program ‘Visit

Beautiful West Sumatera (VBWS) 2023’.

“Program dan inovasi yang telah digagas ini mesti ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi hingga ke angka ideal,” ujarnya.

Wahyu Purnama A dalam penyampaian outlook perekonomian tersebut memproyeksikan perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2023 diprediksi tumbuh pada 4,2 persen hingga 5,0 persen year on year (yoy).

“Salah satu potensi pertumbuhan ekonomi Sumbar adalah pariwisata yang semakin meningkat seiring ditetapkannya tahun 2023 sebagai tahun kunjungan wisata dengan tagline ‘Visit Beautiful West Sumatera 2023’,” katanya.

Wahyu memaparkan, sektor pariwisata akan menggerakkan seluruh kegiatan ekonomi. Mulai dari hotel, makanan dan minuman, berbagai bidang jasa pelayanan hingga perdagangan dan usaha ekonomi kreatif. F



Supardi: PMI Harus Gencar Sosialisasikan Tupoksi

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi menilai sangat penting bagi Palang Merah Indonesia (PMI) untuk mengencarkan sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diembannya. Sosialisasi itu untuk membangun persepsi yang sama terutama kepada pemerintah daerah dan para kepala daerah bahwa keberadaan PMI sangat penting dalam misi kemanusiaan terutama dalam penanganan darurat kesehatan.

Hal itu ditegaskan Supardi saat berkunjung ke Sekretariat PMI Sumatera Barat, Rabu (8/3/2023). Menurutnya, masih ada kepala daerah yang belum mengetahui secara detail tupoksi dari lembaga kemanusiaan tersebut.

“Masih ada yang belum memahami secara detail tupoksi PMI, ini perlu digencarkan sosialisasinya agar terbangun persepsi yang sama bahwa keberadaan PMI itu sangat penting,” tegas Supardi.

Dia menuturkan, PMI dibentuk berdasarkan undang-undang, tidak

sekedar berkaitan donor darah dan bank darah. Tugas utamanya adalah membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan terutama tugas-tugas kepalangmerahan yang meliputi, kesiapsiagaan bantuan dalam penanggulangan bencana, pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan transfusi darah.

“PMI Provinsi Sumbar perlu duduk bersama dengan bupati dan wali kota untuk menjelaskan tentang tupoksi PMI, tidak bisa diandalkan kepada PMI kabupaten dan kota saja,” ulasnya.

Supardi menambahkan, tahun 2023 Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar. Direncanakan akan menambah lagi sekitar Rp2 miliar pada perubahan APBD untuk operasional dan bantuan pembangunan masjid di sekretariat PMI Sumbar. Supardi mengakui, alokasi anggaran tersebut masih tergolong kecil namun ia berharap ke depan PMI bisa menjadi lembaga

kemanusiaan yang mandiri.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Lila Yanwar dalam kesempatan itu menyatakan dukungan untuk PMI. Setelah melihat luasnya ruang lingkup tupoksi PMI maka anggaran yang dialokasikan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat masih tergolong kecil.

“Kami juga mendorong PMI bisa menjadi lembaga yang mandiri. Kami menyarankan agar menyusun rencana strategis sehingga tupoksi yang diamanahkan dapat dijalankan secara optimal,” sebut Lila.

Ketua PMI Provinsi Sumatera Barat Aristo Munandar mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemprov dan DPRD dalam mendukung kelembagaan PMI, baik secara anggaran maupun membantu melalui sumbang saran dalam pelaksanaan program.

“Saran dan masukan yang diberikan akan kami tindaklanjuti agar ke depan kinerja PMI Sumatera Barat dalam melaksanakan tupoksi seperti yang diamanahkan dapat berjalan secara maksimal,” ucapnya. P



DPRD Sumbar Serius Sikapi Wacana Perubahan Status BIM, Pemprov Jangan Lengah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyikapi dengan serius soal wacana perubahan status Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Sementara Pemerintah provinsi jangan lengah terhadap wacana tersebut karena akan membawa dampak kepada percepatan pembangunan daerah.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan sejumlah unsur terkait dalam upaya menyikapi wacana perubahan status BIM tersebut, Selasa (21/2/2023) menegaskan hal itu. Menurutnya, jangan sampai BIM turun status dari bandara internasional menjadi berstatus nasional atau regional.

"DPRD sangat serius dengan wacana ini dan pemerintah daerah jangan lengah, BIM harus dipertahankan statusnya sebagai bandara internasional," tegas Supardi.

Dia menambahkan, sampai saat ini status BIM masih tetap sebagai bandara internasional. Meski demikian, Supardi mengingatkan Pemprov jangan lengah karena bandara daerah lain yang terancam penurunan status tidak akan diam, dan akan melakukan lobi juga ke pemerintah pusat.

"Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD tetap mengirimkan surat ke pemerintah pusat agar BIM jangan diturunkan menjadi bandara kelas nasional," katanya.

Supardi menegaskan, BIM merupakan bandara yang memiliki peran strategis dalam kelangsungan hubungan internasional di Sumbar. Hal itu meliputi perdagangan, investasi, dan gerbang wisatawan mancanegara. Hal itu merupakan penguat bahwa BIM tidak layak untuk turun grade.

"Jadi kita harus tetap menguatkan pemerintah pusat dengan mengemukakan narasi- narasi

strategis BIM untuk menjadi pertimbangan agar bandara tercinta ini tidak turun grade," katanya.

Ketua ASITA Sumbar Darmawi mengemukakan ada tujuh peran strategis BIM untuk dikemukakan kepada pemerintah pusat, diantaranya meliputi sektor sosial budaya, ketenagakerjaan dan investasi. Di Sumatera sendiri ada tujuh bandara Internasional, namun secara statistik BIM lebih banyak memiliki catatan penerbangan internasional.

"Jadi di antara tujuh bandara itu BIM adalah bandara yang aktif dalam penerbangan internasional," katanya.

Dia mengatakan, BIM juga termasuk bandara yang aktif dalam program Kementerian Pariwisata untuk target kunjungan mancanegara. Dalam hal itu pihak kementerian menargetkan kedatangan wisatawan terutama dari India dan Malaysia.

Jadi Embarkasi Haji dan Menunjang Program Visit Beautiful West Sumatera 2023

Masih terkait status Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Supardi sebelumnya telah merespon serius wacana perubahan status bandara tersebut. Menurutnya, BIM juga difungsikan sebagai bandara embarkasi pemberangkatan jamaah calon haji dari Sumatera Barat dan beberapa daerah tetangga.

"BIM menjadi embarkasi pemberangkatan jamaah calon haji, baik dari Sumatera Barat maupun dari Jambi dan Bengkulu, jadi sebaiknya statusnya tetap sebagai bandara internasional," ungkap Supardi.

Selain itu, Sumatera Barat telah mencanangkan tahun 2023 sebagai tahun kunjungan wisata dengan tagar "Visit Beautiful West Sumatera 2023". Dengan status sebagai bandara internasional maka BIM akan sangat menunjang kesuksesan dari

program kunjungan wisata tersebut yang diharapkan akan menyedot banyak kunjungan luar negeri ke Sumatera Barat.

Rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait dilakukan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mempertahankan status BIM sebagai bandara internasional. Sehingga persoalan yang dibahas fokus kepada prospek ke depan dan dampak perubahan status terhadap perekonomian.

DPRD Sumatera Barat, lanjutnya, merespon cepat munculnya wacana penurunan status BIM menjadi bandara domestik serta adanya surat masuk dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Barat terkait wacana itu.

"Munculnya wacana ini harus direspon cepat, kita akan mengundang berbagai pihak terkait termasuk dari PT Angkasa Pura II, Kadin, Asita, PHRI, komunitas pariwisata serta pemerintah daerah untuk membahas persoalan ini terutama dampak yang akan muncul jika BIM berubah status," kata Supardi.

Dia mengungkapkan, DPRD akan berupaya untuk memastikan bandara

tersebut tidak turun status menjadi bandara domestik. Dia berharap pemerintah pusat mempertahankan grade BIM sebagai bandara untuk penerbangan internasional

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar menambahkan, pihaknya berupaya agar terbangun persepsi yang sama dari seluruh pihak terkait bahwa status BIM sebagai bandara internasional layak dipertahankan.

"Penerbangan internasional langsung dari Sumatera Barat sudah semakin ramai, termasuk juga perjalanan haji dan umrah. Selain itu juga kunjungan wisata yang akan semakin terbuka, pengawasan orang asing juga lebih mudah dibanding dengan pemeriksaan di jalur darat," ujarnya.

"Alasan-alasan ini kita harapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk tetap mempertahankan BIM sebagai bandara internasional, apa lagi tahun ini Sumatera Barat menargetkan 8,2 juta kunjungan wisata dari manca negara melalui Visit Beautiful West Sumatera 2023," tukuknya. P





Datangi DPRD Sumbar, PABPDSI Minta Penguatan Fungsi, UU Desa Minta Direvisi

Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) meminta penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam pemerintahan desa atau pemerintahan nagari di Sumatera Barat. Aspirasi itu disuarakan secara nasional dan di Sumatera Barat disampaikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi.

Juru Bicara PABPDSI Sumatera Barat Ezzy Fitriana dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Suwirpen Suib, Rabu (15/2/2023) menyampaikan, secara fungsi BPD atau BPN hampir mirip dengan DPRD di pemerintah kabupaten/ kota dan pemerintah provinsi.

“Jadi PABPDSI meminta penguatan fungsi BPD sebagai unsur pemerintahan desa dan penggantian nama menjadi DPR Desa,” kata Ezzy.

Menurutnya, masih berdasarkan fungsi yang diemban, dia memina dialihkan atau dikembalikan kepada

Badan Perwakilan Desa atau DPR Desa. Sebab menurutnya, BPD memiliki tugas yang sama dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam skala pemerintahan desa atau nagari.

“Namun saat ini posisinya seperti tidak kuat sehingga difungsikan hanya sebagai Badan Permusyawaratan dalam pelaksanaan musyawarah desa,” ujarnya.

Agar perubahan tersebut dapat dimaktubkan di dalam aturan perundang-undangan, maka PABPDSI meminta perubahan terhadap UU nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, terutama pada klausul pemerintahan desa adalah kepala desa dan perangkatnya.

“Kami menyampaikan aspirasi ke DPRD meminta UU nomor 6 tahun 2014 ini direvisi, agar diteruskan kepada pemerintah pusat,” lanjutnya.

Dalam pertemuan itu, Ezzy juga meminta pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan BPD. Dia

menyebutkan, hak-hak keuangan anggota BPD karena tidak diatur secara tegas namun dibebaskan kepada kebijakan pemerintah kabupaten dan kota. “Kami rasa ini tidak adil dan meminta untuk diperhatikan,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Suwirpen Suib memandang, persoalan yang disampaikan oleh PABPDSI sebagai suatu aspirasi yang penting untuk ditindaklanjuti. Untuk itu, Suwirpen menyatakan DPRD akan menampung aspirasi tersebut untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.

“Ini menjadi aspirasi yang penting untuk kami tindak lanjuti sebagai suara masyarakat di daerah kepada pemerintah pusat. Kami akan meneruskannya juga ke DPR RI untuk mendorong agar UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa untuk direvisi,” kata Suwirpen didampingi Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Rafli. F



Guru guru Honorer Datangi DPRD Sumbar

Belasan guru honorer lulus passing grade mewakili ratusan guru honorer lainnya mendatangi DPRD Sumbar demi meminta solusi terkait ketidakjelasan nasib karir mereka, Kamis (5/1). Para guru tersebut melaksanakan diskusi (hearing) bersama Komisi V.

Ketua Komisi V, Daswanto mengatakan, di Sumbar masih tersisa sebanyak 486 orang pegawai pemerintah yang belum ada penempatan. Padahal mereka sudah menjadi pegawai honorer bertahun lamanya. Komisi V, katanya, akan berupaya mencari solusinya untuk guru honorer tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, khususnya Dinas Pendidikan, Kemenpan RB, Menteri pendidikan dan DPR -RI. Diharapkan ada formasi ASN yang bisa dibuka untuk penempatan para guru honorer ini nanti," tegas Daswanto .

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi V, Hidayat. Dia

mengatakan aspirasi para honorer itu perlu diperjuangkan ke Menpan RB, menteri terkait, dan komisi pendidikan di DPR - RI.

"Tidak ada alasan kita untuk tidak memperjuangkan aspirasi mereka, karena ini berkaitan dengan masa depan para guru dan masa depan anak bangsa yang mereka didik," tegas Hidayat.

Sekaitan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat, Barlius menjelaskan bahwa yang tergabung dalam prioritas pemerintah pusat adalah prioritas 1 (P1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. Namun dia berjanji akan membahas untuk mencari solusi bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar.

"Para guru honorer yang telah lulus Passing Grade (PG) 2021 itu sebanyak 2.523 orang dan 1.926 sudah ada penempatan. Sementara penempatan tersebut sudah diatur oleh Kementerian yaitu Kemenpan

RB," ujarnya.

Barlius juga mengatakan, yang belum ada penempatan sama sekali sebanyak 486 orang. Mereka sudah lulus passing grade di kelompok 2.523 orang. Namun terkendala karena ketidaksesuaian ijazah yang dimiliki dengan mata pelajaran.

"Ini yang harus kita perjuangkan nanti ke pemerintah pusat. Kita berharap mereka tidak patah semangat dalam mengajar," terang dia.

Sementara itu, Ketua pengurus Forum Guru Honorer Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) Prioritas I yang lulus passing grade dan tergabung dari berbagai guru honorer dari SMA, SMP serta Disabilitas di Sumbar, Nelvi Wanrita mengatakan mereka yang belum mendapatkan penempatan sekitar 486 orang.

"Semoga ada formasi di tahun 2023 ini, sehingga bisa ada penempatan," katanya.(TT)